

PEMERINTAH KOTA BEKASI



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI 2025-2029 Disesuaikan dengan RPJMD

**JL. LAPANGAN BEKASI TENGAH NO.2
KEL.MARGAHAYU – KEC.BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
KODE POS 17113
TELP/FAX.(021) 882-5243**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Pembahasan/ Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bekasi	26
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	43
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	59
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	62
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD	63
2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah	63
2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	63
2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan	66
2.9.a. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	67
2.9.b. Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	71
2.9.c. Telaahan RTRW dan KLHS	72
2.9.d. Penentuan Isu-isu Strategis	75
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	79
3.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi	79
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	80
3.2.a. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	81

3.2.b. Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi	81
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan	85
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	88
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	115
BAB V PENUTUP	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* atau persamaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aspek yang kedua yaitu *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia memerlukan manajemen pendidikan yang baik agar bisa menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar harapan yang diinginkan, manajemen pendidikan yang baik perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan yang sistematis dan komprehensif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu urusan Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan Program Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025-2029 yang mengusung Visi Walikota Bekasi yaitu Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera dan Misi ke dua yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.

Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (Dinas Pendidikan), tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana strategis juga melibatkan komponen-



komponen masyarakat (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap pendidikan. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan Renstra diperlukan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan sehingga dalam implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang termuat di dalam Renstra dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dalam penyelenggaraannya urusan wajib pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu layanan publik kepada masyarakat (*public services*) sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan RTRW dan KLHS agar terjadi keseimbangan dan keserasian dan keharmonisan pembangunan antar sektor/bidang dan wilayah di Kota Bekasi secara berkelanjutan (*sustainable development*).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 17.
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);



21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11);
24. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 2A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 40);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Renstra sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Menjadi acuan seluruh bidang di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan;
3. Sebagai acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang kerja di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
4. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Bekasi tahun 2025-2029 adalah:

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN



Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Penulisan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Gambaran Pelayanan memuat tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan, Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan serta kelompok sasaran layanan.

Permasalahan dan isu strategis Dinas Pendidikan memuat Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, serta penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menyajikan Tujuan dan Sasaran, Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta Arah kebijakan Dinas Pendidikan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor : 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Sejak disahkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.695-Org/ XII/2021, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki Susunan Organisasi baru sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - b) Seksi Peserta Didik SD;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum SD.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 - b) Seksi Peserta Didik SMP;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum SMP.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Anak Usia Dini.



- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kepala Sekolah dan Pengawas Madya.

A. Kepala Dinas Pendidikan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Unit Pelayanan Pendidikan (UPP) serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendidikan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
 - b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pendidikan;



- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja



pelayanan Dinas;

- o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan pendidikan yang meliputi pelaksanaan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pendidik dan tenaga kependidik sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;



- x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

B. Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada rencana strategis Dinas;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
 - g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat secara berkala;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Unit Pelayanan Pendidikan, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;



- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;



- z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

(4) Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Keuangan.

C. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- 1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kurikulum sekolah dasar, peserta didik sekolah dasar serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar;
 - d. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi dalam pelaksanaan peserta didik sekolah dasar;



- e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dalam kelembagaan serta sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 - f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
 - g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 - j. memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,

- mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi kurikulum sekolah dasar, peserta didik sekolah dasar serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
- a. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Sekolah Dasar.

D. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kurikulum sekolah menengah pertama, peserta didik sekolah menengah pertama serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama untuk mencapai pelaksanaan



teknis urusan di bidangnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum sekolah menengah pertama;
 - d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi dalam pelaksanaan peserta didik sekolah menengah pertama;
 - e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengusulan, pengkajian, pemantauan, pengendalian, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana sekolah menengah pertama;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 - f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
 - g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang



berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi kurikulum sekolah menengah pertama, peserta didik sekolah menengah pertama serta kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.



- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
- Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

E. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
- penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, pengusulan, pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisa, pembinaan, pengendalian, informasi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
 - perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisa, pembinaan, pengendalian informasi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pendidikan masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
- memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;



- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/ Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi kurikulum Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini serta Pendidikan masyarakat;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan



- mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

F. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar serta pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;



- d. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 - f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
 - g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - h. mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/ Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 - j. memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada

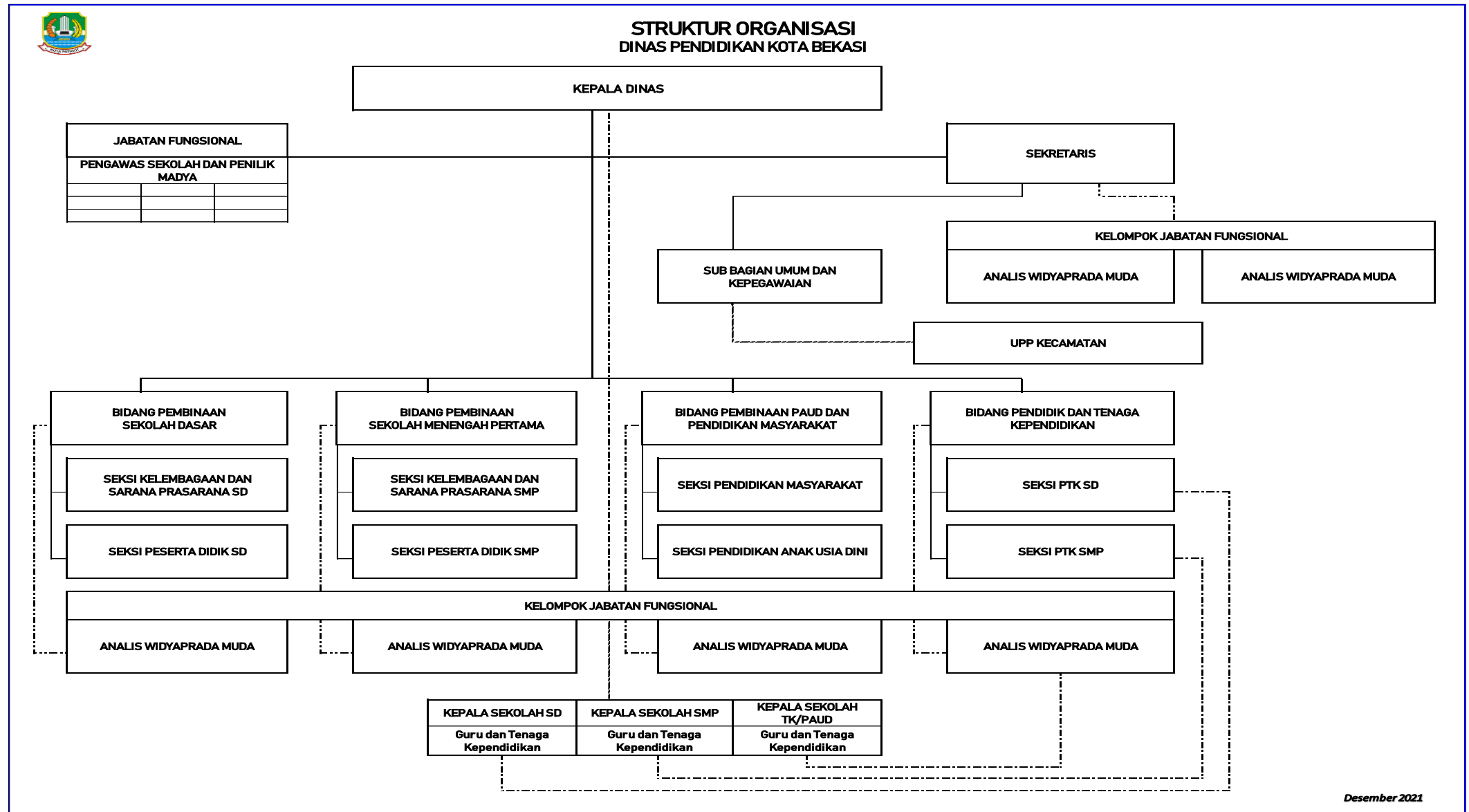
Kepala Dinas;

- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar serta pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- (4) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.



G. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kota Bekasi secara kelembagaan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah sebagai Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, sejak disahkan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.695-Org/XII/2021, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki Susunan Organisasi baru sebagai berikut:





Selain tupoksi, sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit kerja dibutuhkan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistim ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir, untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Berikut ini disajikan judul dan jenis SOP yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Tabel 2.1
Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO	BIDANG/ BAGIAN	NAMA SOP
1	SEKRETARIAT	a) Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU/ UP) b) Penyusunan Neraca c) Pengajuan SPP TUN d) Pengajuan SPP GUN e) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) f) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) g) Pengajuan SPP/ LS barang dan jasa h) Pengajuan SPP/ LS Gaji dan Tunjangan i) Permohonan Pembuat Karis/ Karsu j) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) k) Usulan Kenaikan Gaji Berkala l) Surat Keluar m) Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) n) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur o) Permohonan Cuti Pegawai Negeri Sipil p) Permohonan Pensiun Pegawai Negeri Sipil q) Usulan Kenaikan Pangkat r) Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) s) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) t) Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil u) Permohonan Pembuatan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) v) Surat Masuk w) Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) x) Penyusunan Karti Inventaris Ruangan (KIR)
2		a) Penerbitan kartu NUPTK b) Penerbitan sertifikat NPSN dan NSS c) Penerbitan Kartu NISN d) Penyusunan Renstra pada Dinas Pendidikan e) Penyusunan Renja pada Dinas Pendidikan



NO	BIDANG/ BAGIAN	NAMA SOP
		f) Penyusunan Buku Profil Pendidikan
3		a) Penerbitan Her Registrasi Izin Pendirian Lembaga Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan Dan Taman Bacaan Masyarakat (PKBM, LKP Dan TBM) b) Penerbitan Keterangan Pengganti Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C c) Penerbitan Keterangan Ralat Kesalahan Pada Ijazah Kesetaraan I d) Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Dan Pelatihan Dan Taman Bacaan Masyarakat (PKBM, LKP Dan TBM) e) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini f) Ijin Pendirian dan Heregistrasi PAUD (KB,SPS, TPA) g) Izin Rekomendasi Pendirian Dan Her Registrasi TK
4		a) Tata Cara Pengajuan dan Penerimaan Hibah Bantuan Operasional Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Dinas Pendidikan b) Tata Cara Pengajuan dan Penerimaan Hibah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia yang dikelola oleh Dinas Pendidikan

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat di bagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/ pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPP maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, tutor, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sampai dengan Tahun 2021 tenaga SDM yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 8.916



(Delapan ribu sembilan ratus enam belas) orang terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS.
Dengan rincian berdasarkan jumlah dan gender seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah Personalia									Jumlah Total		
		PNS			PPPK			TKK					
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	12	8	20	22	16	38	20	7	27	54	31	85
3	Bidang Pembinaan SD	4	2	6	7	6	13	6	3	9	17	11	28
4	Bidang Pembinaan SMP	3	5	8	9	6	15	6	1	7	18	12	30
5	Bidang Pembinaan PAUD dan Penmas	3	1	4	6	9	15	4	1	5	13	11	24
6	Bidang PTK	3	3	6	6	5	11	3	-	3	12	8	20
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Widyaprada Ahli Muda	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Pengawas SMP	13	14	27	-	-	-	-	-	-	13	14	27
10	Personalia Fungsional Umum di UPP	31	13	44	-	-	-	23	17	40	54	30	84
11	Pengawas SD	12	8	20	-	-	-	-	-	-	12	8	20
12	Penilik	10	10	20	-	-	-	-	-	-	10	10	20
13	Kepala SDN	118	141	259	-	-	-	-	-	-	118	141	259
14	Kepala TKN	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	9	9
15	Guru SDN	454	1.373	1.827	836	2.131	2.967	52	65	117	1.342	3.569	4.911
16	Guru TKN	-	48	48	-	5	5	-	2	2	-	55	55
17	Staff TU dan Administrasi di SDN	60	15	75	186	248	434	300	84	384	546	347	893
18	Staff TU dan Administrasi di TKN	-	1	1	1	2	3	1	2	3	2	5	7
19	Kepala SMPN	27	23	50	-	-	-	-	-	-	27	23	50
20	Guru SMPN	209	626	835	267	466	733	41	46	87	517	1.138	1.655
21	Staff TU dan Administrasi SMPN	25	10	35	242	180	422	205	61	266	472	251	723
22	Kepala SKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Guru SKB	-	-	-	-	-	-	5	5	10	5	5	10
24	Staff TU dan Administrasi SKB	1	-	1	1	2	3	-	-	-	2	2	4
Jumlah Seluruhnya		986	2.311	3.297	1.583	3.076	4.659	666	294	960	3.235	5.681	8.916

Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah keseluruhan
27



Personalia baik Struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 8.916 orang, dengan status sebagai PNS sebanyak 3.297 orang, P3K sebanyak 4.659 dan TKK sebanyak 960 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Asset Kendaraan Bermotor Dinas Pendidikan Kota Bekasi

No	Jenis Kendaraan	Merk	Tahun Pembuatan	Jumlah Kendaraan	Kondisi
1	MOBIL	TOYOTA KIJANG INNOVA 2,4 G A/T DIESEL	2022	1	BAIK
		Daihatsu/Terios R / AT Adventure	2016	1	BAIK
		Toyota / Kijang KF83 GR	2004	1	BAIK
		Daihatsu/Gran Max Puick Up	2009	1	BAIK
		Daihatsu Xenia / F 601 RV-GMDFJJ	2010	1	BAIK
		Daihatsu / Terios F 700 RG TS	2010	2	BAIK
		Daihatsu Xenia E 601 RV / Xi MC1.3 Sporty (MB)	2011	2	BAIK
		SUZUKI / Side Kick Drag	2001	1	BAIK
		TOYOTA / KIJANG	1992	1	BAIK
		Toyota / Kijang	2001	1	BAIK
2	MOTOR	HONDA / MCB 97 SPORT	1999	1	BAIK
		HONDA / MCB 97 SPORT	2002	1	BAIK
		HONDA / MCB 97 SPORT	2003	1	BAIK
		HONDA / NF100N SL	2005	1	BAIK
		Honda / Beat	2009	1	BAIK
		Honda NF11T11C01 M/T (REVO)	2014	1	BAIK
		Honda / Beat Sporty CW	2015	1	BAIK
		Honda / Beat Sporty CW	2015	1	RUSAK SEDANG
		YAMAHA / MIO M3 CW VIN 2018 / SE 88	2018	3	BAIK
		HONDA / MCB 97 SPORT	2004	6	BAIK
		HONDA / MCB 97 SPORT	2004	1	RUSAK SEDANG

Sumber Data : ATISISBADA, 2024

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah Asset kendaraan bermotor lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, beroda empat berjumlah 12 kendaraan, dan beroda dua berjumlah 18 kendaraan.

Asset Bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :



Tabel 2.4
Jumlah Asset Bangunan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan		Kondisi Bangunan		
		Milik Negara	Pinjam Pakai/ Numpang/ Sewa	Baik	Sedang	Kurang
1	Bangunan Kantor Dinas Pendidikan	1	-	-	-	1
2	UPP Pendidikan Kecamatan se-Kota Bekasi	12	-	-	12	-
3	SKB se-Kota Bekasi	1	-	1	-	-
4	TK Negeri se-Kota Bekasi	9	3	8	1	-
5	SD Negeri se-Kota Bekasi	315	-	117	196	2
6	SMP Negeri se-Kota Bekasi	56	-	50	6	-
7	USB SMP Negeri se-Kota Bekasi	3	3	3	-	-
8	Gedung Arsip Dinas Pendidikan	1	-	-	-	1
Total		398	6	179	215	4

Sumber Data : ATISISBADA, 2024

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah Asset Bangunan lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sejumlah 398 Bangunan yang terdiri dari Bangunan Kantor Dinas, UPP, SKB, TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, USB SMP Negeri dan Gedung Arsip Dinas Pendidikan yang secara keseluruhan kondisi bangunannya baik sejumlah 179 bangunan, kondisi rusak sedang sejumlah 215 bangunan dan kondisi kurang sejumlah 4 bangunan.

Untuk data prasarana ruang kelas SMP Negeri di Kota Bekasi, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Data Prasarana Ruang Kelas SMP Negeri Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO	NAMA SEKOLAH	ADA	TIDAK ADA	RUANG KELAS				JUMLAH
				KONDISI				
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	SMP Negeri 1 Kota Bekasi	v		19		7	1	27
2	SMP Negeri 2 Kota Bekasi	v		30				30
3	SMP Negeri 3 Kota Bekasi	v		24			3	27
4	SMP Negeri 4 Kota Bekasi	v		18	4	4	3	29
5	SMP Negeri 5 Kota Bekasi	v				27		27
6	SMP Negeri 6 Kota Bekasi	v		27				27
7	SMP Negeri 7 Kota Bekasi	v		18		9		27
8	SMP Negeri 8 Kota Bekasi	v		18	5	3	3	29
9	SMP Negeri 9 Kota Bekasi	v		25	4	2		31
10	SMP Negeri 10 Kota Bekasi	v		15	9		3	27



NO	NAMA SEKOLAH	ADA	TIDAK ADA	RUANG KELAS				JUMLAH
				KONDISI				
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
11	SMP Negeri 11 Kota Bekasi	v		29				29
12	SMP Negeri 12 Kota Bekasi	v		26			6	32
13	SMP Negeri 13 Kota Bekasi	v		30	2			32
14	SMP Negeri 14 Kota Bekasi	v		23				23
15	SMP Negeri 15 Kota Bekasi	v		14	13			27
16	SMP Negeri 16 Kota Bekasi	v		26		1		27
17	SMP Negeri 17 Kota Bekasi	v		29				29
18	SMP Negeri 18 Kota Bekasi	v		21		4	2	27
19	SMP Negeri 19 Kota Bekasi	v		5	18	4		27
20	SMP Negeri 20 Kota Bekasi	v		22	2	1		25
21	SMP Negeri 21 Kota Bekasi	v		6	9	6	4	25
22	SMP Negeri 22 Kota Bekasi	v		9	4	10		23
23	SMP Negeri 23 Kota Bekasi	v		21	1	2		24
24	SMP Negeri 24 Kota Bekasi	v		12	2	4		18
25	SMP Negeri 25 Kota Bekasi	v		29				29
26	SMP Negeri 26 Kota Bekasi	v		19	3		2	24
27	SMP Negeri 27 Kota Bekasi	v		23		3	1	27
28	SMP Negeri 28 Kota Bekasi	v		20			5	25
29	SMP Negeri 29 Kota Bekasi	v		4	10		2	16
30	SMP Negeri 30 Kota Bekasi	v		22	2			24
31	SMP Negeri 31 Kota Bekasi	v		27				27
32	SMP Negeri 32 Kota Bekasi	v		17		1	2	20
33	SMP Negeri 33 Kota Bekasi	v		28				28
34	SMP Negeri 34 Kota Bekasi	v		19	5	3		27
35	SMP Negeri 35 Kota Bekasi	v		18				18
36	SMP Negeri 36 Kota Bekasi	v		19		1		20
37	SMP Negeri 37 Kota Bekasi	v		11	5	3		19
38	SMP Negeri 38 Kota Bekasi	v		16				16
39	SMP Negeri 39 Kota Bekasi	v		14		1		15
40	SMP Negeri 40 Kota Bekasi	v		23				23
41	SMP Negeri 41 Kota Bekasi	v		15				15
42	SMP Negeri 42 Kota Bekasi	v		20				20
43	SMP Negeri 43 Kota Bekasi	v		12				12
44	SMP Negeri 44 Kota Bekasi	v		14	1	1		16
45	SMP Negeri 45 Kota Bekasi	v		3	6			9
46	SMP Negeri 46 Kota Bekasi	v		11	2			13
47	SMP Negeri 47 Kota Bekasi	v		24				24
48	SMP Negeri 48 Kota Bekasi	v		20	4			24
49	SMP Negeri 49 Kota Bekasi	v		12	15			27
50	SMP Negeri 50 Kota Bekasi	v		11			5	16
51	SMP Negeri 51 Kota Bekasi	v		7				7
52	SMP Negeri 52 Kota Bekasi	v		3	4	5		12
53	SMP Negeri 53 Kota Bekasi	v		5				5
54	SMP Negeri 54 Kota Bekasi	v			3	4	3	10
55	SMP Negeri 55 Kota Bekasi	v					12	12



NO	NAMA SEKOLAH	ADA	TIDAK ADA	RUANG KELAS				JUMLAH
				KONDISI				
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
56	SMP Negeri 56 Kota Bekasi	v		5				5
	TOTAL			938	133	106	57	1234

Adapun Usulan Kegiatan Rehab dan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Kegiatan Rehab dan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,6 9	52,09	81.23 7	60	80.72 9	65,5	85.72 9	70,35	90.50 0	75	93.50 0	80,35	95.00 0	
	Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah			jml total	97.41 0	jml total	56.64 8	jml total	74.79 7							
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			selisih	- 16.17 3	selisih	24.08 1	selisih	10.93 2							
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas															
		Rehabilitasi Berat SDN Aren Jaya VIII			3.009											
		Rehabilitasi Total SDN Jatisari II			2.885											
		Rehabilitasi Total SDN Bintara Jaya V			2.755											
		Rehabilitasi Total SDN Jatibening III			1.924											
		Rehabilitasi Total SDN Kota Baru IX			1.395											
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatirangga I			1.894											
		Rehabilitasi Total SDN Jatirahayu VI			1.608											
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiranggon II			459											
		Rehabilitasi Ruang Kelas dan Penataan Halaman SDN Mustikasari II			2.735											
		Rehabilitasi Berat SDN Jatisari III			481											
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Perwira VII			1.966											



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya XVII			1.904											
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Jakasetia IV			2.341											
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatirangga II			1.570											
		Rehabilitasi SDN Aren Jaya XVIII			2.182											
		Rehabilitasi SDN Margahayu XIX			798											
		Rehabilitasi Total SDN PengasinanIV			1.936											
		Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya IV														
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II					1.041									
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Rawalumbu VI					1.243									
		Rehabilitasi Sedang SDN Jatiasih I					1.087									
		Reahabilitasi Total SDN Jatikramat I					1.977									
		Rehabilitasi Sedang/Barat SDN Jatikramat VIII					551									
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiluhur IV														
		Rehabilitasi Sedang SDN Bintara VI					664									
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji I					1.017									
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji V					1.553									
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening IV					791									
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening V					595									
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bekasi Jaya III					786									
		Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya VIII														
		Penataan Halaman SDN Bojong Menteng II														
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Menteng IV														



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Rehabilitasi Gedung SDN Pejuang I						4 RK 2 lantai	2.405							
		Rehabilitasi Gedung SDN Jatisampurna X						4 RK 2 lantai	2.405							
		Rehabilitasi Gedung SDN Aren Jaya XII						rehab bangun an 328.05 m2	1.968							
		Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejuang VIII						8 RK 2 lantai	3.830							
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru															
		Rehabilitasi SDN Cikiwul II			2.317											
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SDN Bantar gebang VI			285											
		Penambahan Ruang Kelas SDN Cikiwul I			2.317											
		Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bantargebang V Kota Bekasi			2.748											
		Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bantargebang IV			2.748											
		Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bantargebang III Kota Bekasi			2.748											
		Rehabilitasi SDN Ciketing Udik III			1.963											
		Pembanguna n SDN Kayuringin Jaya VII			676											
		Pembanguna n Gedung SDN Kayuringin XIII			2.986											
		Lanjutan pembangunan SDN Duren Jaya II			1.028			2 RKB 2 lantai	2.405							
		Lanjutan Pembanguna n Gedung SDN Jatibening Baru VII			245											
		Pembanguna n Gedung SDN Margamulya I			2.961											
		Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kaliabang Tengah III			1.832											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Halaman SDN Harapan Mulya I			25											



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembanguna n Gedung SDN Mustika Jaya IV			85											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembanguna n Gedung SDN Kaliabang Tengah I			85											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembanguna n SDN Jatikramat VI			85											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembanguna n Gedung SDN Harapan Mulya II			85											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Sepanjang Jaya III			95											
		Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Kalibaru I														
		Lanjutan Pembanguna n SDN Harapan Mulya I					259									
		Pembanguna n Gedung SDN Cimuning V														
		Pembanguna n Gedung SDN Mustika Jaya IV				4 RKB	2.083									
		Pembanguna n Gedung SDN Kaliabang Tengah I					294									
		Lanjutan Pembanguna n SDN Jatikramat VI					1.412									
		Pembanguna n Gedung SDN Harapan Mulya II					1.101									
		Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Sepanjang Jaya III					2.408									
		Pembanguna n SDN Aren Jaya IV														
		Pembanguna n SDN Pejuang V														
		Rehabilitasi Total SDN Jaticempaka IV														
		Rehabilitasi Total SDN Jatimekar VIII							3.935							



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Lanjutan Pembanguna n SDN Duren Jaya II							2.405							
		Pembanguna n SDN Pekayon Jaya VIII						6 RKB 2 lantai	3.341							
		Pembanguna n Gedung SDN Mustika Jaya IV							2.080							
		Pembangunan Gedung SDN Padurenan III						4 RK 2 lantai	2.405							
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
		Rehabilitasi Pagar, Penataan Halaman dan Pembanguna n Gapura SDN Harapan Jaya III			558											
		Belanja Modal Pembanguna n Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah			700											
		Penataan Halaman SDN Mustika Jaya VI			228											
		Perbaikan Lapangan Sekolah SDN Duren Jaya VII			100											
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II			70											
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Rawalumbu VI			70											
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Sedang SDN Jatiasih I			70											
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Total SDN Jatikramat I			75											
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatikramat VIII			45											
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Sedang SDN Bintara VI			48											



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji I			70											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji V			75											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening IV			45											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening V			45											
		Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bekasi Jaya III			53											
		Penataan Halaman SDN Harapan Mulya I					300									
		Penataan Halaman SDN Harapan Mulya II					300									
		Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya IV					559									
		Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya V					360									
		Penataan Halaman, SDN Harapan Jaya IX, XVI, XVII					294									
		Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah I					294									
		Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah II					422									
		Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah IV					220									
		Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah VI					294									
		Penataan Halaman SDN Harapan Baru III dan V					566									
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Jatiasih IV					200									
		Penataan Halaman SDN Jatiluhur III					185									



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Aren Jaya VI					200									
		Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya VIII					357									
		Pembanguna n Musholla SDN Bekasi Jaya V					150									
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Margahayu II					200									
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Margahayu V					200									
		Renovasi Pagar dan Gapura SDN Margahayu XIX					150									
		Penataan Halaman SDN Pejuang I, III					200									
		Penataan Halaman SDN Pedurenan IV					631									
		Penataan dan Pemagaran SDN Mustikasari I					817									
		Penataan Halaman SDN Mustika Jaya II					428									
		Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Jatirangga III				halam an 491,6 9 m2 pagar 133,2 5 m	606									
		Penataan Halaman SDN Jatisampurna III					300									
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Jati Sampurna VIII					200									
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Jati Sampurna IX					200									
		Penataan Halaman SDN Jakasetia IV														
		Rehabilitasi Pagar Gedung SDN Pejuang VII				pagar sampi ng 150m	441									
		Rehabilitasi SDN Pekayon Jaya VIII														
		Penataan Halaman SDN Marga Jaya I														
		Rehabilitasi Ringan SDN Jatibening Baru VI						pengga ntian atap dan langit2	531							



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU															
		Pembanguna n Ruang Guru dan Penataan Halaman SDN Jatiasih IV			933											
		Pembangunan Ruang Kantor SDN Bekasi Jaya XI					1.102									
		Pembanguna n Ruang Guru dan WC SDN Aren Jaya X dan XIV														
		Pembanguna n Ruang Guru SDN Jatirahayu III					621									
		Lanjutan Pembanguna n Sanggar Pendidikan SKB Kota Bekasi														
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru															
		Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Atap Gedung SMPN 27 Kota Bekasi			2.700											
		Pembanguna n Ruang Kelas Baru dan Penataan Pagar SMP Negeri 55 Kota Bekasi			847											
		Pembanguna n Gedung SMPN 24 Kota Bekasi					2.644									
		Pembanguna n Gedung SMPN 25 Kota Bekasi					5.289									
		Pembanguna n Gedung SMPN 27 Kota Bekasi														
		Pembanguna n Gedung SMPN 29 Kota Bekasi					2.644									
		Pembangunan Gedung SMP Negeri 30 Kota Bekasi					3.085									
		Pembanguna n SD dan SMP Terpadu														
		Pembanguna n SMAN 21														
	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
		Pembanguna n Gedung SMPN 61 Kota Bekasi						21.00 1								



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Pembanguna n Gedung SMPN 62 Kota Bekasi							9.444							
		Pembanguna n USB SMP di Kelurahan Margahayu														
		Pembanguna n Gedung SMPN 52 Kota Bekasi														
		Pembanguna n Gedung SMPN 57 Kota Bekasi					10.00 0									
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
		Rehabilitasi Gedung SMPN 13 Kota Bekasi			359											
		Rehabilitasi Gedung SMPN 15 Kota Bekasi			3.326											
		Rehabilitasi Gedung SMPN 18 Kota Bekasi			2.163			rehab total 2 RK, 2 lantai	1.176							
		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 12 Kota Bekasi			3.589											
		Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 16 Kota Bekasi			3.772											
		Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 19 Kota Bekasi			4.578											
		Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 44 Kota Bekasi			3.084											
		Rehabilitasi Total SMPN 32 Kota Bekasi			6.708											
		Rehabilitasi Gedung SMPN 8 Kota Bekasi			1.594											
		Rehabilitasi Gedung SMPN 11 Kota Bekasi			2.460											
		Rehabilitasi SMPN 58 Kota Bekasi			228			pagar keliling 386 m, halaman 984 m2	1.519							
		Rehabilitasi SMPN 60 Kota Bekasi			550											
		Rehabiilitasi Gedung SMPN 10 Kota Bekasi							5.967							
		Rehabilitasi SMPN 4 Kota Bekasi					3.326									
		Lanjutan Pembanguna n Gedung SMPN 3 Kota Bekasi						lanjutan lt.3 dan 6 RKB 3 lantai	4.330							
		Lanjutan Rehabilitasi Gedung SMPN 11 Kota Bekasi							2.817							



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Lanjutan Pembanguna n Gedung SMPN 21 Kota Bekasi							228							
		Rehabilitasi Gedung SMPN 23 Kota Bekasi														
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas															
		Penataan Halaman SMPN 33 Kota Bekasi							606							
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD															
		Rehab ruang kelas dan pagar TK Negeri Pembina Kota Bekasi														
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
		Pembanguna n Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			192											
		Pembanguna n Pagar Baru TK Negeri VIII Kota Bekasi			922											

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Ba se lin e 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K e t
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Targ et	Pagu	Targ et	Pag u	Target	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
1 2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN & SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase terselesaikan nya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	33	36,76	117.05 5	43,2	254.6 00	50,34	260.00 0	55,65	280.00 0	61,85	300.00 0	65,7	320.00 0	
	Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan															
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah															



No	Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Ba se lin e 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Targ et	Pagu	Targ et	Pag u	Target	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
	Kabupaten/ Kota															
	Subkegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota															
		Terselesaikanny a permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan SDN Jatibening Baru 2 Kecamatan Pondok Gede			100.05 5		154.6 00									
		Terselesaikan nya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan SDN Jatisampurna 2 Kecamatan Jati Sampurna			17.000		100.0 00									

Adapun asset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Asset Barang Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KET.
1	Meja Kerja Kabid/ Kasie/ Kasubbag	22 Unit	
2	Meja Kerja Staff	201 Buah	
3	Meja Rapat	26 unit	
4	Meja Kerja Kayu	14	
5	Meja 1/2 Biro	347	
6	Meja Sekolah	2	
7	Mimbar Pidato	2 buah	
8	Kursi Kerja Kabid/ Kasie/ Kasubbag	11 set	
9	Kursi Kerja Staff	200 unit	
10	Kursi Putar	8	
11	Kursi Rapat	101 unit	
12	Kursi Tamu	59 buah	
13	Kursi Lipat	2	
14	Kursi Kayu	48	
15	Kursi biasa	123	
16	Kursi Plastik	2	
17	Bangu Sekolah	1	
18	Sofa Tamu	18 buah	
19	Lemari besi	56 buah	
20	Lemari kayu	121 set	
21	Lemari Kaca	3	
22	Lemari Penyimpan	1	



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KET.
23	Filling Kabinet besi	75 buah	
24	Rak Besi/Metal	109 buah	
25	Rak Kayu	59 buah	
26	Rak Penyimpanan	7	
27	P.C Unit	110 buah	
28	Lap Top	64 buah	
29	Printer	82 unit	
30	Mesin ketik manual	16	
31	Mesin ketik listri	1	
32	Alat Penghancur Kertas	20 unit	
33	Alat Pemadam Kebakaran	10 unit	
34	Alat Kantor Kainnya	62	
35	AC	43 unit	
36	Kipas Angin	36 buah	
37	Alat Pendingin Lainnya	2	
38	Lemari es	2	
39	Televisi	19 buah	
40	Jam dinding	56 buah	
41	Telephone	3 unit	
42	Telephone Antar Ruang	0 unit	
43	Alat Pembersih Lain-lain	20 unit	
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	40	
45	Dispenser	10 unit	
46	Infocus	8 buah	
47	Gbr Presiden & Wkl Presiden	24 buah	
48	Gambar Garuda	53 buah	
49	Sound System	5 pasang	
50	Wireless	1 buah	
51	Karpet	10 buah	
52	Amplifier	3 buah	
53	Micropon	0 set	
54	White Board	98 buah	
55	Vertical Blind	50 buah	
56	Breket	10 buah	
57	Server	5 set	
58	Hub	1 buah	
59	Papan nama instansi	13 Buah	
60	Peralatan permainan Lainnya	2 Buah	
61	Papan Pengumuman	68 Buah	
62	Unit Tranceiver VHF	2 Unit	
63	Peta	3 Buah	
64	Cctv	4 Buah	
65	Mesin absensi	6 buah	

Sumber Data : ATISISBADA, 2024



Adapun jumlah sekolah dari tingkat TK, SD dan SMP Negeri yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Jumlah PAUD (TK), SD dan SMP Negeri per Kecamatan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Kecamatan	PAUD	SD	SMP
1	2	3	4	5
1	Pondokgede	1	30	4
2	Jatisampurna	1	17	5
3	Pondokmelati	1	18	1
4	Jatiasih	1	30	7
5	Bantargebang	1	17	4
6	Mustika Jaya	1	22	6
7	Bekasi Timur	1	43	8
8	Rawa Lumbu	1	28	5
9	Bekasi Selatan	1	27	6
10	Bekasi Barat	1	36	5
11	Medan Satria	1	13	4
12	Bekasi Utara	1	34	7
Total		12	315	62

Sumber : Dapodikdasmen Tahun Pelajaran 2024/2025

Berdasarkan tabel 2.9 dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah TK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 12 sekolah, sedangkan Jumlah total SD Negeri berjumlah berjumlah 315 Sekolah dan Jumlah SMP Negeri 62 Sekolah.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Kontribusi capaian indeks pendidikan terhadap IPM Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebesar 83,55% dengan demikian pada gilirannya Indeks Pendidikan Kota Bekasi yang cukup tinggi tersebut, telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian Indeks Pendidikan Jawa Barat, yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Adapun jumlah sekolah dari tingkat PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Jumlah PAUD Negeri dan Swasta dan Pendidikan Masyarakat (Penmas) per Kecamatan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah TK		Jumlah Total TK	Kelompok Bermain	TPA	SPS	PKBM	SKB	LKP
		Negeri	Swasta							
1	Bantargebang	1	26	27	6	0	19	4	0	2
2	Bekasi Barat	1	59	60	20	1	21	4	0	10



No	Kecamatan	Jumlah TK		Jumlah Total TK	Kelompok Bermain	TPA	SPS	PKBM	SKB	LKP
		Negeri	Swasta							
3	Bekasi Selatan	1	53	54	10	1	25	7	0	22
4	Bekasi Timur	1	88	89	4	1	35	6	0	16
5	Bekasi Utara	1	104	105	14	4	24	8	1	12
6	Jati Sampurna	1	52	53	9	0	5	5	0	11
7	Jatiasih	1	72	73	6	1	30	8	0	6
8	Medan Satria	1	56	57	13	0	9	3	0	8
9	Mustika Jaya	1	81	82	19	2	12	2	0	6
10	Pondok Melati	1	47	48	5	0	18	4	0	8
11	Pondokgede	1	76	77	15	0	17	11	0	14
12	Rawalumbu	1	52	53	15	0	23	4	0	12
	JUMLAH	12	766	778	136	10	238	66	1	127

Sumber : Dapodikdasmen Tahun Pelajaran 2024/2025 semester ganjil

Berdasarkan tabel 2.10, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah TK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 778 sekolah, sedangkan Jumlah total PAUD berjumlah berjumlah 1.152 Lembaga. Jumlah Lembaga Nonformal, yang terdiri dari PKBM, SKB dan LKP keseluruhannya berjumlah 194 Lembaga.

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per Kecamatan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Kecamatan	PAUD		SD		SMP	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pondokgede	1	108	30	29	4	21
2	Jatisampurna	1	66	17	23	5	15
3	Pondokmelati	1	70	18	13	1	14
4	Jatiasih	1	108	30	30	7	30
5	Bantargebang	1	51	17	9	4	7
6	Mustika Jaya	1	112	22	28	6	20
7	Bekasi Timur	1	127	43	26	8	23
8	Rawa Lumbu	1	90	28	30	5	24
9	Bekasi Selatan	1	88	27	24	6	15
10	Bekasi Barat	1	100	36	28	5	18
11	Medan Satria	1	78	13	34	4	25
12	Bekasi Utara	1	142	34	40	7	33
Total		12	1140	315	314	62	245

Sumber : Dapodik, 2025

Berdasarkan tabel 2.11 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 315 sekolah, dan Sekolah Dasar Swasta berjumlah 314 sekolah, sedangkan SMP Negeri berjumlah 62 sekolah dan SMP Swasta berjumlah 245 sekolah.

Adapun perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU), IPM dan Indeks Pendidikan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.12
Pencapaian IKU, IPM serta INDEKS PENDIDIKAN Kota Bekasi
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IPM	81,50	81,95	82,46	83,06	83,55
2	Indeks Pendidikan	76,09	76,87	77,33	78,08	78,58
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,00	14,10	14,11	14,12	14,14
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,16	11,31	11,44	11,66	11,79
5	Persentase capaian smart school (Grand Design)		50	55	36	46
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,275	82,23	83,84	79,33	84,35
7	Nilai AKIP	78,12	BB	76,48	60,06	60,05

Sumber: *Indek Pembangunan Manusia, Satlak PPK-IPM, BPS Kota Bekasi, dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.*

Peningkatan IPM dan Indeks Pendidikan berserta indikatornya yaitu HLS dan RLS baik secara langsung maupun tidak langsung ditunjang oleh program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi yaitu melalui program penyetaraan Paket A, B, dan C, juga peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah harus terus menerus dilakukan. Selain itu juga ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam kurun waktu tahun 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.12 dibawah ini :



Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
(Tahun 2021 – 2024)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik				66.67	83.33	100.00	20,69		23	64	100	20,69		83.33				
2	Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam Kondisi Baik				57.14	76.19	100.00			12	59	100			76.19				
3	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik				60.00	80.00	100.00	70		46	65	100	70		80.00				
4	APM SD				100.00	100.00	100.00	100		98,08	84,57	100	100		100.00				
5	APM SMP				97.56	96.16	100.00	100		84,35	65,91	100	100		96.16				
6	APM PAUD				56.43	58.84	61.43	60		54,73	43,03	61,43	60		58.84				
7	Angka kelulusan pendidikan kesetaraan				100.00	100.00	100.00			100	100	100			100.00				
8	SD Negeri Terakreditasi A				90.25	90.4	90.45			91,29	100	90,45			90.4				
9	SMP Negeri Terakreditasi A				90.00	90.00	90.00			95,55	84,00	90			90.00				
10	Capaian Perolehan Prestasi Tingkat Propinsi, Nasional, Internasional Jenjang Pendidikan Dasar				56	58	80.00			7	100	60			58				
	TAMBAHAN PROGRAM SESUAI RENSTRA 2024-2026																		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
11	APK SD							100,01					100,01						
12	Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD							1,95					1,95						
13	Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD							1,7					1,7						
14	Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A							79,43					79,43						
15	APK SMP							100					100						
16	Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP							2,0					2,0						
17	Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP							2,0					2,0						
18	Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan							5 : 12					5 : 12						
19	Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan							91,07					91,07						
20	APK PAUD							60					60						
21	Persentase PAUD Terakreditasi B							38,71					38,71						
22	APM Kesetaraan							87,23					87,23						
23	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik							36,11					36,11						
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																		
1	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar				70.00	75.00	80.00	80.00		81,97	77,57	80	80.00		75.00				
2	Cakupan Pelayanan Berbasis				20.00	30.00	40.00	40.00		50	55,00	40			30.00				



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	IT												40,00						
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN																		
1	Presentase Pendidikan Dasar Terakreditasi B				90,25	90,4	90,45	90,45		91,87	91,00	90,45	90,45		90,4				
2	PAUD Terakreditasi				15	20	25,00	25,00		39,15	40,14	25	25,00		20				
3	Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi				35,97	36,11	38,04	38,04		31,62	42,11	38,04	38,04		36,11				



Melihat kondisi ini Pemerintah Daerah perlu mengupayakan penembahan daya tampung pada sekolah negeri dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP terutama di Kecamatan/ Kelurahan yang belum tersedia SMP Negeri dengan tetap memperhitungkan jumlah lulusan SD/ MI yang ada di wilayah tersebut serta memperhitungkan keberadaan sekolah swasta. Juga perlu didorong peran pendidikan luar sekolah melalui pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif bagi penduduk yang tidak mempunyai kesempatan masuk pada jalur pendidikan formal dengan berbagai macam kendala/ hambatan.

Pencapaian Pelaksanaan SPM Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Pencapaian Pelaksanaan SPM Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020 – 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/Mts)	-	-	100%	99,52%	100%	99,97%	100%	99,87%	100%	99,68%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	-	-	100%	100%	100%	94,19%	100%	52,95%	100%	25,57%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	-	-	100%	54,56%	100%	81,50%	100%	68,62%	100%	71,15%

Sumber : RPJMD 2025-2029

Pencapaian SPM pada tahun 2024 mengalami penurunan, diantaranya SPM Kesetaraan. Faktor yang menyebabkan penurunan diantaranya karena dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masalah ekonomi yang berdampak pada partisipasi pendidikan, Pandemi Covid secara keseluruhan dapat menurunkan kualitas pendidikan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai e-lppd dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Pencapaian Pelaksanaan SPM Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020 – 2024

No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang ber-partisipasi dalam PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	68.74%	410 Pendidik	85,24%	567 Pendidik	91,48%	513 Pendidik



No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAKINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAKINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAKINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAKINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAKINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAKINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		11.816 orang		11.816 orang		61.536 orang
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan		340 pendidik		340 pendidik		2.182 Pendidik
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		3.708 kebutuhan pendidik		3.708 kebutuhan pendidik		3.708 kebutuhan pendidik
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		5.809 Pendidik		6.334 Pendidik		6.334 Pendidik
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		3.671Pendidik		3.428 Pendidik		3.428 Pendidik
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pemerintah pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga		1.398 Kepala Sekolah		1.179 Kepala Sekolah		1.179 Kepala Sekolah
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	110.14%	405 Sekolah	93,95%	377 Sekolah	98,84%	377 Sekolah
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		259.726 pendidik		239.870 pendidik		239.870 pendidik
10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		118.844 pendidik		126.943 pendidik		126.943 pendidik



No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		156.266 pendidik		179.932 peserta didik		179.932 peserta didik
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		48.920 Pendidik		57.087 Pendidik		57.087 Pendidik
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		10.560 kebutuhan pendidik		10.560 kebutuhan pendidik		10.560 kebutuhan pendidik
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2.194 kebutuhan pendidik		4.681 kebutuhan pendidik		4.681 kebutuhan pendidik
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		12.393 pendidik		11.092 pendidik		11.092 pendidik
16		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		6.159 pendidik		6.548 pendidik		6.548 pendidik
17		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1.711 kebutuhan pendidik		1.711 kebutuhan pendidik		1.711 kebutuhan pendidik
18		umlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1.666 pendidik		5.230 pendidik		5.230 pendidik
19		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		2.448 pendidik		2.448 pendidik		2.448 pendidik
20		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2.023 pendidik		2.023 pendidik		2.023 pendidik
21		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		5.730 guru		9.834 guru		9.834 guru



No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.167 guru		5.085 guru		5.085 guru
23		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		781 kepala sekolah		781 kepala sekolah		781 kepala sekolah
24		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		354 kepala sekolah		380 kepala sekolah		380 kepala sekolah
25		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		910 orang		910 orang		910 orang
26		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		76 orang		538 orang		538 orang
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	89%	405 Sekolah	101,13%	377 Sekolah	84,96%	377 Sekolah
28		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		259.726 pendidik		239.870 pendidik		239.870 pendidik
29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		118.844 pendidik		126.943 pendidik		126.943 pendidik
30		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan		156.266 pendidik		179.932 peserta didik		179.932 peserta didik



No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan						
31		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		48.920 Pendidik		57.087 Pendidik		57.087 Pendidik
32		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		10.560 kebutuhan pendidik		10.560 kebutuhan pendidik		10.560 kebutuhan pendidik
33		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2.194 kebutuhan pendidik		4.681 kebutuhan pendidik		4.681 kebutuhan pendidik
34		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		12.393 pendidik		11.092 pendidik		11.092 pendidik
35		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		6.159 pendidik		6.548 pendidik		6.548 pendidik
36		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1.711 kebutuhan pendidik		1.711 kebutuhan pendidik		1.711 kebutuhan pendidik
37		umlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		1.666 pendidik		5.230 pendidik		5.230 pendidik
38		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		2.448 pendidik		2.448 pendidik		2.448 pendidik
39		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2.023 pendidik		2.023 pendidik		2.023 pendidik
40		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		5.730 guru		9.834 guru		9.834 guru
41		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.167 guru		5.085 guru		5.085 guru



No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		781 kepala sekolah		781 kepala sekolah		781 kepala sekolah
43		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		354 kepala sekolah		380 kepala sekolah		380 kepala sekolah
44		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		910 orang		910 orang		910 orang
45		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		76 orang		538 orang		538 orang
46	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	100%	54 Satuan Pendidik	100%	58 Satuan Pendidik	100%	58 Satuan Pendidik
47		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		1.332 peserta didik		6.309 peserta didik		6.309 peserta didik
48		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0 peserta didik		0 peserta didik		0 peserta didik
49		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		342 kebutuhan pendidik		342 kebutuhan pendidik		342 kebutuhan pendidik
50		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		342 pendidik		342 pendidik		342 pendidik



No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2023	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2023	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2024	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2024	CAPAIAN KINERJA OUTCOME 2025	CAPAIAN KINERJA OUTPUT 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		152 pendidik		152 pendidik		152 pendidik
52		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		781 kepala sekolah SD		781 kepala sekolah		781 kepala sekolah
53		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		67 kepala sekolah		67 kepala sekolah		67 kepala sekolah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi memandang perlu program-program yang belum terealisasi sebagai program prioritas pada periode Renstra selanjutnya.



Tabel 2.15
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021-2024

NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	887.951.160.686	942.642.335.876	948.774.369.286	1.130.106.715.686	852.003.205.969	850.066.745.632	824.927.397.346	951.278.381.606	0,96	0,90	0,87	0,84		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	413.473.456.653	723.132.185.040	801.463.585.883	766.891.780.936	340.998.979.329	678.397.091.511	757.267.414.143	720.565.577.260	0,82	0,94	0,94	0,94		
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.375.000.000	2.825.000.000	2.655.000.000	2.234.200.000	2.099.589.000	1.148.599.340	2.004.836.086	1.479.607.100	0,88	0,41	0,76	0,66		
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		500.000.000	441.225.000	1.000.000.000		137.775.000	271.473.700	342.283.300		0,28	0,62	0,34		
	JUMLAH	1.303.799.617.339	1.669.099.520.916	1.753.334.180.169	1.900.232.696.622	1.195.101.774.298	1.529.750.211.483	1.584.471.121.275	1.673.665.849.366	0,92	0,92	0,90	0,88		

Dari tabel 2.15 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan keterserapan anggaran yang baik pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 dimana anggaran yang ada dialokasikan untuk empat mata anggaran dengan rata-rata keterserapan diatas 50%, kecuali pada Program Pendidik dan tenaga kependidikan yang hanya 41% keterserapan pada tahun 2022 dikarenakan pandemi dan Program Pengendalian perizinan pendidikan dengan keterserapan 28% pada tahun 2022 dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan. Keterserapan tertinggi terjadi pada tahun Ke-3 dan ke-4 (tahun 2021) dengan Rp 1.195.101.774.298 dan (tahun 2022) Rp 1.529.750.211.483 atau 92% dari anggaran yang diajukan yakni Rp 1.303.799.617.339 dan Rp 1.669.099.520.916. Sedangkan keterserapan anggaran paling rendah terjadi pada tahun ke-4 (tahun 2024) dengan Rp 1.673.665.849.366 atau 88% dari anggaran yang diajukan yakni Rp 1.900.232.696.622.

Adapun keterserapan anggaran per tahun anggaran beserta faktor pendukung dan penghambatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-1 (tahun 2021) tertinggi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan daya serap sebesar Rp 852.003.205.969 (96%) atau dengan rasio 0,96. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 340.998.979.329; (82%) atau dengan rasio 0,82.

Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diantaranya kebutuhan pelayanan rutin kantor yang maksimal dilaksanakan. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan pelaksanaan Program Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan diantaranya dengan adanya pandemi covid, sehingga kegiatan yang sifatnya massal (berkerumun) seperti workshop/ pelatihan guru tidak dilaksanakan.

- b. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-2 (tahun 2022) tertinggi pada program Pengelolaan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 678.397.091.511 (94%) atau dengan rasio 0,94. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 137.775.000; (28%) atau dengan rasio 0,28
- c. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-3 (tahun 2023) tertinggi pada program Pengelolaan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 757.267.414.143 (94%) atau dengan rasio 0,94. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 271.473.700; (62%) atau dengan rasio 0,62
- d. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-4 (tahun 2024) tertinggi pada program Pengelolaan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 720.565.577.260 (94%) atau



dengan rasio 0,94. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan daya serap sebesar Rp 342.283.300; (34%) atau dengan rasio 0,34.

Faktor yang mendukung keberhasilan program Pengelolaan Pendidikan adalah kegiatan rutin pengelolaan dana BOS SD, BOS SMP, BOP PAUD. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan pelaksanaan program Pengendalian perizinan pendidikan adalah adanya

Tabel 2.16
Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Lima Tahun Terakhir

No.	JENJANG	JUMLAH LEMBAGA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	TK	6	763	10	798	10	798	10	805	10	805
2	RA										
3	SD	356	297	356	301	356	301	317	307	317	307
4	MI	1	134	1	135	1	135	1	135	1	135
5	SMP	56	245	56	243	61	243	56	247	56	247
6	MTS	3	78	3	78	3	78	3	82	3	82
7	SMA										
8	MA										
9	SMK										

Berdasarkan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bekasi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya lembaga pendidikan yang berstatus swasta, khususnya pada jenjang TK pada tahun 2023. Kondisi berbeda terjadi pada pendidikan yang berstatus negeri, tinggi minat masyarakat dalam pendidikan sampai saat ini belum dapat terakomodir sepenuhnya oleh sekolah negeri sehingga swasta mendominasi.

Berdasarkan data pendidikan perkembangan dan pertumbuhan siswa setiap jenjang baik melalui program persekolahan maupun pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Keadaan Jumlah Siswa Lima Tahun Terakhir

NO	JENJANG	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	41.399	30.982	43.584	63.927	42.002
2	TK/ RA	29.427	24.722	32.694	31.644	



NO	JENJANG	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	SD/ MI	236.687	225.886	222.664	222.405	222.405
4	PAKET A	924			1.117	
5	SMP/ MTS	93.978	93.369	92.575	92.575	92.575
6	PAKET B	1786			2100	
7	SMA/ MA					
8	SMK					
9	PAKET C	290			2.654	

Dari data pertumbuhan jumlah siswa dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 terlihat peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya pada masing-masing jenjang pendidikan.

Peningkatan partisipasi positif juga ditunjukkan pada pendidikan non formal dalam bentuk Paket Kesetaraan (A, B, dan C) yang pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Kondisi ini merupakan hal positif bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai upaya dalam penguatan sumber daya manusia daerah yang memadai melalui pendidikan non formal.

Meskipun banyak program yang telah tercapai, namun masih adanya kesenjangan dalam layanan Pendidikan yang dirasakan, diantaranya: 1) akses pada setiap jenjang dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang pendidikan dasar, 2) mutu pendidikan, 3) kualitas guru dan tenaga kependidikan, 3) pengelolaan ujian nasional yang berkualitas, 4) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, 5) penyediaan sarana dan prasanana pendidikan, serta 5) penyebaran guru yang belum merata.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyelenggarakan pelayanan berdasarkan spesifikasi dan urgensinya yang ditujukan kepada masing-masing kelompok sasaran. Adapun jenis pelayanan Dinas Pendidikan meliputi beberapa hal sebagaimana tersaji pada berikut ini:

Tabel 2.18
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Pembangunan ruang kelas, ruang guru/KS/TU, perpustakaan sekolah, UKS, sarana/utilitas sekolah.	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM



No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
2	Rehabilitasi sedang ruang kelas, ruang guru/KS/TU, perpustakaan sekolah, UKS, sarana/utilitas sekolah.	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM
3	Penyediaan mebel, alat praktik/peraga, perlengkapan siswa, perlengkapan sekolah	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM
4	Pembinaan kelembagaan dan manajemen satuan pendidikan	Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP
5	Pengelolaan dan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	Satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
6	Penyelenggaraan penerimaan peserta didik, proses pembelajaran, dan penilaian belajar	Peserta didik PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP
7	Pemberian Bantuan Pendidikan bagi siswa tidak mampu – Biaya Personil Pendidikan	Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin TK, SD/MI, dan SMP/MTs
8	Penyelenggaraan lomba kreativitas/minat/bakat peserta didik	Peserta didik SD dan SMP
9	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	PTK PAUD, TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP

Adapun Jenis Layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD), adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini dibagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK).
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal yaitu : KB (Kelompok Bermain), SPS (Satuan PAUD Sejenis) dan TPA (Tempat Penitipan Anak).
2. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu satuan pendidikan non formal, PKBM diharapkan dapat menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi diri dan keterampilan. Dengan Tujuan Melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, PKBM dibentuk dengan tujuan membuka kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan keterampilan. Ketiga unsur

ini akan membentuk masyarakat yang mampu bersaing dan mencari nafkah secara mandiri. Kegiatannya antara lain:

- Kejar Paket A Setara SD/MI
- Kejar Paket B Setara SMP/MTs
- Kejar Paket C Setara SMA/MA
- PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan)

3. LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) adalah jenis satuan pendidikan non-formal yang merupakan bagian dari pendidikan vokasi, yang berfokus pada pengajaran keterampilan praktis untuk dunia kerja atau wirausaha. Sementara itu, vokasi merujuk pada sistem pendidikan secara keseluruhan (termasuk pendidikan tinggi dan menengah) yang bertujuan membekali peserta didik dengan keahlian terapan. Jadi, LKP adalah implementasi atau lembaga di dalam sistem pendidikan vokasi, bukan sebuah alternatif yang setara, yang mencakup berbagai jenjang pendidikan, termasuk SMK (menengah) dan perguruan tinggi vokasi, dengan kegiatannya antara lain:

- Kursus Menjahit
- Tata Rias Pengantin
- Tata Rias Rambut
- Kursus Komputer
- Kursus Rumpun Bahasa (Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, dsb)

Penguasaan keahlian terapan dan keterampilan yang dibutuhkan langsung oleh dunia kerja/industri. Manfaatnya untuk membekali lulusan dengan keahlian spesifik yang membuatnya siap untuk bekerja, serta memiliki peluang karir yang terbuka luas.

Jenis Layanan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, tidak mampu dan tahfiz pada Jenjang SD dan SMP;
2. Pelayanan pelaksanaan lomba tingkat Kota, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
3. Pelayanan pemberian workshop, Bimtek dan Pelatihan bagi guru negeri maupun swasta dalam rangka peningkatan Kompetensi guru;
4. Pelayanan pemberian insentif bagi guru swasta;
5. Pelayanan pengawasan dan pendampingan dalam rangka peningkatan mutu sekolah negeri dan swasta gunakan meningkatkan atau mempertahankan peringkat Akreditasi Sekolah;
6. Pelayanan pemberian rekomendasi ijin mendirikan sekolah.



2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam menjalankan program/kegiatan senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemberian pelayanan ini sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, maka salah satu bentuk layanan yang bisa dimanfaatkan adalah kemitraan. Adapun Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian pelayanan, tersaji pada tabel 2.19 berikut ini:

Tabel 2.19
Mitra Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Pemberian Pelayanan

No.	Nama Lengkap Lembaga	Alamat Lembaga	Telepon	Uraian Kegiatan Lembaga	Nomor SKT/ No Badan Hukum	Nama & Jabatan Pengurus
1	2	3	4	5	6	8
1	PGRI KOTA BEKASI	Perumahan Puri Asih Jalan Perumahan Puri Asih RT 04 RT 17, Jakasetia, Bekasi Selatan		ORGANISASI GURU	J.A.5/82/12 tanggal 20 Septemb er	DEDI MUFRODI, M.Pd. - KETUA
2	HIMPAUDI KOTA BEKASI	JL. GARUDA II NO.31 RT.004/05 KELURAHAN JAKASAMPURN A KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI	0218843075	1. Diklat Berjenjang tingkat dasar dan lanjut 2. Diklat Managemen PAUD 3. Pelatihan/Seminar/ Workshop tentang PAUD 4. Manasik Haji Anak PAUD dengan metode parenting 5. Porseni Pendidik dan Anak PAUD		RUSILOWATI EFFENDY, S.E.M.PD - KETUA
3	IGTKI-PGRI KOTA BEKASI	Jl Anugrah no 22 Jatimakmur Pondok gede Kota Bekasi	0821 1358 8182 / 0857 7164 0010 / 0812 9334 6626	Kegiatan organisasi yang berhubungan dengan Guru dan siswa terprogram setiap tahun , porseni guru dan porseni anak TK , peragaan manasik haji anak tk		KURNENGSI H , S.Pd . M.Si - KETUA
4	DEWAN PENDIDIK AN KOTA BEKASI	Jl. Jeruk Raya Perumnas 1 Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi		Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kota Bekasi.		

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

BUMD sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah mempunyai peran yang besar dalam menunjang proses pembangunan. Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Melihat dari fungsinya, Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Kiprah Badan Usaha Milik Daerah dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam pembangunan.

Melihat urgensi peran BUMD dalam pembangunan, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi bisa memanfaatkan peluang tersebut, walaupun saat ini belum ada dukungan BUMD yang Signifikan.

2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Untuk saat ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum ada pernah menyelenggarakan Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Diharapkan untuk kedepannya, Dinas Pendidikan dapat menyelenggarakan Kerjasama Daerah dalam segala bidang demi untuk memajukan rencana pembangunan daerah.

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas sebagaimana yang diharapkan melalui Renstra Pendidikan Kota Bekasi 2025-2029 ini tentunya tidaklah mudah mengingat tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan semakin kompleks sebagai akibat dari dinamisasi masyarakat daerah, nasional dan global. Sejumlah tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dengan menelaah Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan sasaran menyelenggarakan pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah;
 - b. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
2. Perluasan dan Peningkatan Akses Pendidikan
 - a. Kebutuhan unit sekolah baru, perbaikan dan penambahan ruang kelas baru, perpustakaan, dan laboratorium untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan akses pendidikan;

- b. Masih terdapat siswa putus sekolah baik dikarenakan faktor pembiayaan maupun non pembiayaan;
- c. Diberlakukannya sistem zonasi sekolah yang berdampak pada APK dan APM;
- 3. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan
 - a. Kebutuhan tenaga pendidik (guru) profesional, kesesuaian kualifikasi, serta linearitas pendidikan yang dimiliki;
 - b. Belum terakreditasi seluruhnya lembaga pendidikan di tingkat PAUD, SD/ MI, SMP/ MTs, maupun PKBM/ LPK/ Kursus;
 - c. Tuntutan relevansi pendidikan non-formal (PKBM, LPK, Kursus) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, yaitu diharapkan warga yang mengikuti kegiatan dapat memiliki skill atau kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Skill dan kemampuan tersebut bisa dikembangkan dengan masuk ke dunia industry atau dengan membuka usaha sendiri atau lapangan pekerjaan. Adapun PKBM diperuntukan untuk melengkapi kebutuhan administrasi bagi karyawan yang belum memiliki Ijazah, misalkan untuk melengkapi sederajat SMA bisa menempuh Paket C;
 - d. Dominasi sekolah swasta menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan, yaitu dengan masih adanya sekolah swasta yg tidak melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dengan cara mengikut sertakan guru-guru nya dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
 - e. Optimalisasi peran dan fungsi pengawas sekolah belum optimal dalam mewujudkan kapasitas sekolah yang memadai (*school capacity*);
 - f. Belum ada kurikulum muatan lokal untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Bekasi, inilah perlunya keterlibatan tokoh masyarakat, budayawan, sejarawan, dan seniman dalam penguatan budaya dan nilai kearifan lokal dalam pendidikan.
- 4. Layanan Pendidikan
 - g. Sinergitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dengan instansi/ dinas terkait belum terlaksana dengan baik;
 - h. Dukungan perangkat/ infrastruktur ICT dalam mewujudkan Sistem Informasi Pendidikan belum dioptimalkan;
 - i. Keterlibatan komite sekolah dalam penguatan manajemen sekolah belum optimal;
 - j. Kebutuhan payung hukum kebijakan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.
- 5. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran di satuan pendidikan yang mendukung Proses Pembelajaran yang aman dan nyaman dengan menciptakan iklim kebhinakaan, iklim keamanan dan iklim inklusifitas dalam lingkungan sekolah.

Disamping itu, tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai wujud implemementasi kebijakan daerah dalam RTRW dan pengembangan Lingkungan Hidup Strategis berkelanjutan Kota Bekasi diantaranya:

1. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Sampai tahun 2021 ini, Kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri sebanyak 8 Kelurahan. Diantaranya Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat, Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede, Jati Murni dan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati, Harapan Mulya dan Kalibaru Kecamatan Medan Satria serta Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna;
2. Penataan dan/ atau pengembangan kawasan pendidikan tinggi (perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi dan yang sederajat) eksisting maupun baru di PPK dan koridor jalan Jatiwaringin; dan
3. Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap.
4. Permasalahan lingkungan hidup yang perlu penanganan secara optimal, diantaranya : a) sekolah banjir yang terjadi di beberapa kecamatan; b) kemacetan pada jalan-jalan protokol pada jam-jam masuk dan keluar sekolah akibat banyaknya kendaraan yang ada tidak diimbangi dengan ruas jalan yang dimiliki; c) sampah yang diakibatkan oleh adanya TPA Bantargebang dan Sumurbatu, sehingga sekolah di wilayah tersebut terganggu akibat bau yang ditimbulkan; d) minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk area bermain anak sekolah.

Selain dari tantangan yang dihadapi, peluang yang dapat dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Renstra adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ICT dengan berbagai perangkatnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, jangkauan, dan akses pendidikan bagi masyarakat serta mendukung Smart School;
2. Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah (kabupaten/ kota) memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan dan penguatan pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan *shareholder* daerah, yaitu dengan menjadikan pengembangan pendidikan inklusi sebagai salah satu prioritas/ agenda kerja kepala daerah. Pendidikan inklusi sudah dilaksanakan di semua sekolah, negeri maupun swasta di kota Bekasi, dengan meningkatkan kompetensi guru inklusi di semua sekolah.
3. Penerapan konsep *tripartite* di bidang pendidikan dimana masyarakat dan industri sebagai *partner* Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan dan penguatan kompetensi peserta didik yang diharapkan;
4. Dukungan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menjadikan Pendidikan sebagai sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pembangunan budaya di Jawa Barat.

5. Membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Inovasi Pembangunan Pendidikan jenjang Menengah Keatas dengan mendirikan Sekolah Taruna di Kota Bekasi.

Dukungan terhadap kajian lingkungan hidup strategis Dinas Pendidikan melakukan perubahan pola pikir dan karakter yang akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat dan juga makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan masyarakat suatu daerah diharapkan tidak melebihi ambang batas yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada. Maka dari itu, perkiraan dampak resiko yang akan terjadi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup perlu diantisipasi sejak awal dan dilakukan tindakan preventif salah satunya melalui upaya penyadaran kepada masyarakat dan edukasi kepada peserta didik melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman nilai kecintaan terhadap lingkungan; dengan tidak merusak keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar, berupaya meminimalisir dampak yang sudah terjadi, serta melakukan konservasi terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menerapkan nilai kecintaan terhadap lingkungan hidup adalah : dengan melakukan penanaman tanaman sebagai penghijauan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru dan siswa, menyediakan tempat sampah di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, melakukan kegiatan jumat bersih yang dilakukan oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah dan memperkenalkan siswa pada pengolahan sampah di Bantargebang Kota Bekasi.

2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Lembaga pendidikan sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan layanan publik (*public services*) yang berkualitas di bidang pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal akibat dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Maka dari itu, perlu rumusan rencana strategis dengan mendasarkan pada sejumlah isu-isu strategis yang ada sehingga Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dicapai dengan baik. Analisis terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu dilakukan agar diperoleh gambaran akan permasalahan yang dihadapi untuk dicari alternatif solusi pemecahannya.

Target Tahun 2025 yang belum tercapai yaitu pemenuhan sarana prasarana sekolah, pendirian USB sekolah baru pada kelurahan yang belum mempunyai Sekolah Negeri jenjang SMP di 8 Kelurahan (Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat, Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede, Jati Murni dan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati, Harapan Mulya dan Kalibaru Kecamatan Medan Satria serta

Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna). Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah menjadikan pengembangan pendidikan inklusi sebagai salah satu prioritas/ agenda kerja kepala daerah. Di kota Bekasi, pendidikan inklusi sedang dan terus dilaksanakan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, termasuk pelatihan guru, penyusunan program layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), dan dukungan dari dinas pendidikan dan sekolah.

2.9.a Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Keterlaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan penghambat baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun eksternal lembaga. Sejumlah program dapat direalisasikan dengan baik, tetapi ada juga sejumlah program yang belum direalisasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik yang muncul, diantaranya karena faktor SDM internal Dinas Pendidikan sendiri maupun SDM pelaksana kebijakan dan program, yakni tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat sekolah. Selain itu, faktor yang juga harus menjadi pertimbangan adalah berkenaan dengan sarana prasarana pendidikan yang ada.

Sarana Prasarana menjadi faktor penting yang berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Semakin berkualitas sarana prasarana yang ada, maka prestasi peserta didik yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Faktor selanjutnya yang juga menjadi perhatian adalah ketersediaan sistem informasi pendidikan. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum memiliki sistem informasi yang memadai, dari sistem informasi sarana prasarana, tenaga pendidik & kependidikan, peserta didik, pembiayaan pendidikan, kurikulum, kelembagaan/ manajemen sekolah, komite sekolah, maupun sistem informasi lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pendidikan. Maka dari itu, ketiga faktor tersebut menjadi prioritas Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk masa lima tahun mendatang dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Analisis lingkungan internal dan eksternal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang didalamnya mencakup: (1) sumber daya aparatur, tenaga pendidik dan kependidikan; (2) sarana prasarana layanan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan; (3) kualitas layanan dan mutu pendidikan; (4) relevansi pendidikan non-formal (PKBM/ Kursus, dll) dengan dunia industri; dan (5) tata kelola dan organisasi kelembagaan.

Hasil analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) berdasarkan sejumlah bidang permasalahan tersebut secara detail adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) yang memadai secara kuantitas dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- b. Kapasitas organisasi (*organizational capacity*) Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan yang ditetapkan dengan adanya seperangkat regulasi dan prosedur yang memadai sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan teknis layanan pendidikan.
- c. Dukungan perangkat ICT (*Informational Communication and Technology*) dalam menunjang pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien serta mendukung Smart School.
- d. Pendanaan (APBD Kota Bekasi) yang memadai memberikan peluang akan implementasi program-program strategis dalam peningkatan akses dan pemerataan mutu Pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang Pendidikan yang ada.
- e. Ketersediaan layanan pendidikan di setiap kelurahan untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Kurangnya sumber daya manusia pada kelompok jabatan fungsional (pengawas), penilik dan tenaga pamong pembinaan profesional guru manajemen sekolah;
- b. Pemanfaatan ICT sebagai *management tool, decision & executive support system* belum sepenuhnya digunakan sehingga sejumlah layanan masih menggunakan cara konvensional dan berdampak pada efektivitas kebijakan dan layanan;
- c. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan, dengan berpartisipasi aktif dalam penguatan sekolah khususnya dalam penguatan budaya daerah, kesenian, keagamaan, serta nilai kearifan lokal pada masing-masing daerah;
- d. Peran komite sekolah belum sampai pada partisipasi aktif dengan terlibat secara langsung pada program-program strategis yang disusun oleh sekolah, bukan hanya penyampai aspirasi tetapi juga sebagai *partner* sekolah;

- e. Penguatan peran Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) masih perlu ditingkatkan sebagai wadah penguat profesi dan juga pelestari budaya dan nilai kearifan lokal;
- f. Rasio pengawas/ penilik dengan guru sangatlah jauh, sehingga efektivitas pembinaan (supervisi) dan pengawasan yang selama ini dilakukan belum berjalan optimal dan tidak menyentuh pada kegiatan instruksional;
- g. Pendidikan non formal (PKBM/ LPK/ Kursus,dll) belum menjadi pilihan masyarakat dalam pengembangan *hard & soft skill* sehingga lembaga perlu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha / industri dalam penetapan standar kompetensi dan membuka peluang keterserapan lulusan;
- h. Sarana prasarana pendidikan di beberapa sekolah belum memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar karena minimnya dukungan secara pendanaan dari pemerintah maupun masyarakat.
- i. Sinergitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dengan instansi/ dinas terkait belum terlaksana dengan baik;
- j. Implementasi SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada Pendidikan Anak Usia Dini belum optimal khususnya pada standar tenaga pendidik, dimana hampir sebagian besar tenaga pendidik (guru) berpendidikan SMA/ Sederajat.

3. *Opportunity (Peluang)*

- a. Letak geografis yang strategis dimana Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Aksesibilitas transportasi yang baik sehingga peserta didik mudah dalam menjangkau lembaga pendidikan yang diinginkan;
- c. Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi khususnya dalam kebijakan peningkatan dan pengembangan pendidikan di Kota Bekasi;
- d. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi cukup besar dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan;
- e. Dukungan dari pelaku industri dalam penguatan *soft skill* tenaga pendidik maupun partisipasi program-program pendidikan melalui pemberian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- f. Perkembangan ICT dengan berbagai perangkatnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, jangkauan, dan akses pendidikan bagi masyarakat;
- g. Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah (kabupaten/ kota) memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan dan penguatan

pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan *shareholder* daerah;

- h. Penerapan konsep *tripartite* di bidang pendidikan dimana masyarakat dan industri sebagai *partner* Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan dan penguatan kompetensi peserta didik yang diharapkan;
- i. Dukungan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menjadikan Pendidikan sebagai sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pembangunan budaya di Jawa Barat.

4. **Threats (Ancaman)**

- a. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, dan penyalahgunaan internet lainnya sehingga perlu adanya edukasi internet positif kepada peserta didik ;
- b. Relevansi pendidikan khususnya pada pendidikan non-formal (PKBM/ LPK/ Kursus) untuk meningkatkan keterserapan lulusan di dunia industri ;
- c. Rendahnya integrasi program-program pendidikan dimana program yang ada masih disusun secara terpisah (parsial) sehingga perlu adanya sinkronisasi antara instansi/ dinas terkait ;
- d. Paradigma masyarakat yang menganggap tanggungjawab pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga) ;
- e. Belum meratanya kualitas lembaga pendidikan dan kecenderungan persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri berdampak pada kesenjangan dalam penerimaan peserta didik baru dimana sekolah swasta adalah alternatif setelah sekolah negeri ;
- f. Meningkatnya demoralisasi masyarakat yang berdampak pada pola pergaulan peserta didik dan kecenderungan berperilaku negative; merokok, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, dan lain-lain sehingga berpengaruh terhadap kemajuan dan kualitas lulusan pendidikan.
- g. Adanya tuntutan akan relevansi pendidikan non-formal (PKBM, LPK, Kursus) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- h. Belum terakreditasi seluruhnya lembaga pendidikan di tingkat PAUD, SD/ MI, SMP/ MTs, maupun PKBM/ LPK/ Kursus.
- i. Kebutuhan tenaga pendidik (guru) yang profesional, kesesuaian kualifikasi, serta linearitas pendidikan yang dimiliki belum terpenuhi.



- j. Dominasi sekolah swasta menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan, dengan masih adanya sekolah swasta yg tidak melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dengan cara mengikut sertakan guru-gurunya dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
- k. Ketidaksiapan peserta didik dan tenaga pendidik dalam menghadapi pembelajaran berbasis IT.

2.9.b Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan muncul akibat adanya kesenjangan (gap) antara kenyataan yang terjadi (hasil capaian) dengan apa yang diharapkan. Kondisi ini menjadi indikasi adanya ketidakselararan kegiatan maupun pelaksanaan program yang tetapkan. Identifikasi terhadap masalah pokok beserta akar permasalahan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Sesuai dengan Pemerintah Kab/Kota mempunyai kemenangan pelayanan pendidikan pada jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	Penduduk usia sekolah tidak bersekolah dan putus sekolah		Pengaruh teknologi informasi dan kemudahan akses menyebabkan Kenakalan remaja (Games Online)	Tingginya Pengaruh sosmed bagi siswa pendidikan dasar	tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk disekolah milik pemerintah Biaya Transport melebihi biaya sekolah	kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan belum optimal
	Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepadatan penduduk	Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap		Jumlah rombel di sekolah milik pemerintah melebihi SPM/ melebihi daya tampung	Sebaran pendidik/ kependidikan tidak sesuai kebutuhan	Kurangnya aksesibilitas SMP, PAUD dan Kesetaraan
	Sarana prasarana sekolah tidak merata	Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat, SMP/		Belum meratanya kualitas sekolah		Belum terpenuhinya SPM Pendidikan



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
		sederajat				
	Kurangnya Pengendalian Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat				Masih banyak lembaga Pendidikan yang dikelola masyarakat berstatus belum akreditasi	Keterbatasan Program Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas/ penilik baik akademik maupun manjerial
	Kurangnya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Kompetensi Pendidik yang masih kurang	Perlunya Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Peran MGMP dan KKG yang masih terbatas pada kegiatan yang bersifat rutin dan belum kepada kegiatan yang bersifat strategis	
	Pelayanan Pendidikan berbasis IT belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam " Smart School"			Penggunaan Pelayanan Pendidikan berbasis IT yang belum merata	Belum adanya SDM yang secara khusus mengembangkan dan mengelola ICT di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Belum di manfaatkannya ICT secara optimal guna mendukung kinerja Dinas Pendidikan
	Kendala dalam Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk respon pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat.		Indeks Literasi dan Numerasi turun	Masih adanya guru yang tidak mau belajar atau sudah masuk zona nyaman, sehingga kurang dalam pengembangan kemampuan Pedagogik.	Kurang menguasainya guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka Kurang menguasainya guru dalam hal TIK untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka	Masih kurangnya sosialisasi penggunaan Kurikulum Merdeka

2.9.c Telaahan RTRW dan KLHS

Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara tentunya secara pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya memiliki keterkaitan erat dengan dinamisasi masyarakat yang ada. Pendidikan sebagai *social elevator* dapat meningkatkan citra positif masyarakat suatu daerah melalui penguasaan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendidikan tidak lepas dari aspek lingkungan hidup pada suatu wilayah karena sejatinya pendidikan adalah bagian dari lingkungan hidup yang muncul dan berkembang akibat adanya kebutuhan masyarakat. Saat ini pendidikan menjadi salah satu bidang yang dikelola secara otomom oleh pemerintah daerah dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing daerah. Meskipun demikian, akses

terhadap pendidikan oleh masyarakat tidak dibatasi secara teritori sehingga masyarakat luar Kota Bekasi memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan pendidikan perlu memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan hidup yang ada agar tidak terjadi alih fungsi wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 diharapkan agar pembangunan yang dilakukan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya mengarahkan pembangunan di Kota Bekasi yang dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan penyelenggaraan tata ruang di wilayah Kota Bekasi adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota Bekasi dilakukan sebaik mungkin dengan tidak merusak lingkungan alam serta situs budaya yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik. Maka dalam kebijakannya, rencana pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan pada:

- a. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ SMK;
- b. Penataan dan/ atau pengembangan kawasan pendidikan tinggi (perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi dan yang sederajat) eksisting maupun baru di PPK dan koridor jalan Jatiwaringin; dan
- c. Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap.

Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan selain dari aspek ruang dan wilayah harus juga mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur, demografi, dan ketersediaan pusat layanan administrasi publik. Melalui penataan ruang dan wilayah yang baik serta mengedepankan kelestarian budaya, alam dan lingkungan sekitar dengan mengedepankan azas azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan dapat mewujudkan Kota Bekasi yang kreatif, aman, nyaman dan sejahtera.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 diartikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (KRP).

Pada dasarnya KLHS adalah upaya pemerintah daerah dalam menganalisa rencana pembangunan yang disusun sudah sesuai dengan pengembangan berkelanjutan atau belum (*sustainability development*). Dengan adanya KLHS ini diharapkan pemerintah daerah dalam pembangunan wilayahnya memperhatikan permasalahan lingkungan hidup yang akan terjadi dan bagaimana upaya dalam membangun lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelaahan terhadap KLHS yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi secara khusus dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai dampak/ efek lingkungan, sekaligus mendorong segenap elemen daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tiga prinsip utama yang menjadi azas dalam penyusunan KLHS yakni: keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*). Prinsip keterkaitan (*interdependency*) mengandung pengertian bahwa pembangunan harus memiliki keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, antar unsur dengan unsur lainnya, antar instansi dengan instansi lainnya, antar sektor dengan sektor lainnya, maupun antar wilayah dengan wilayah dengan wilayah lainnya. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) menekankan pada keseimbangan antara aspek, pemangku kepentingan, ekosistem, makhluk hidup dengan ruang hidupnya, pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, serta keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampak yang akan ditimbulkan. Sedangkan prinsip keadilan (*justice*) menekankan pada produk kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan tidak membatasi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, infrastruktur, atau informasi kepada seluruh masyarakat daerah.

Pemerintah Kota Bekasi dengan luas wilayah $\pm 21,049$ Ha yang terdiri 12 kecamatan dan 56 kelurahan dalam hal permasalahan lingkungan hidup ada isu lingkungan yang perlu penanganan secara optimal. Isu lingkungan tersebut diantaranya: a) sekolah banjir yang terjadi di beberapa kecamatan; b) kemacetan pada jalan-jalan protokol pada jam-jam masuk dan keluar sekolah akibat banyaknya kendaraan yang ada tidak diimbangi dengan ruas jalan yang dimiliki; c) sampah yang diakibatkan oleh adanya TPA Bantargebang dan Sumurbatu, sehingga sekolah di wilayah tersebut terganggu akibat bau yang ditimbulkan; d) minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk area bermain anak sekolah.

Dukungan lingkungan hidup yang memadai akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat dan juga makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan masyarakat suatu daerah diharapkan tidak melebihi ambang batas yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada. Maka dari itu, perkiraan dampak resiko yang akan terjadi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup perlu diantisipasi sejak awal dan dilakukan tindakan preventif salah satunya melalui upaya penyadaran kepada masyarakat dan edukasi kepada peserta didik

melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman nilai kecintaan terhadap lingkungan; dengan tidak merusak keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar, berupaya meminimalisir dampak yang sudah terjadi, serta melakukan konservasi terhadap kerusakan lingkungan hidup.

2.9.d Penentuan Isu-isu Strategis

Sejumlah isu strategis yang menjadi dasar rumusan kebijakan dan program Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasarkan pada analisis kondisi esksting melalui kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan bidang-bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sejumlah isu-isu strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Akreditasi Sekolah/ Lembaga Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Guru

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas harus ditunjang oleh pengelolaan lembaga yang profesional, tenaga pendidikan yang kompeten, kurikulum terpadu, integritas kepemimpinan serta keterpenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan. Pengakuan akan kredibilitas lembaga pendidikan harus dibuktikan dengan adanya Akreditasi dari lembaga berwenang yang menjamin bahwa lembaga pendidikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, memberi kesempatan perbaikan pembelajaran. Meningkatkan Kompetensi Guru merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tujuan Peningkatan Kompetensi Guru salah satunya melalui program Diklat Peningkatan Kompetensi Guru, dimana diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi baik pedagogik maupun profesional, selain itu guru diharapkan memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya

2. Pemerataan dan Daya Tampung Pendidikan

Salah satu problematik yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah berkenaan dengan pemerataan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepada kepadatan penduduk, menyebabkan kurangnya aksesibilitas SMP, PAUD dan Kesetaraan.

Tingginya anak usia 0-6 tahun di Kota Bekasi berdampak pada daya tampung lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang ada. Pada sejumlah kecamatan, terjadi kesenjangan antara lembaga penyelenggara dengan anak usia

sekolah, sehingga tidak semua anak usia 0-6 dapat memperoleh layanan pendidikan memadai.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik

Kualitas pembelajaran ditentukan bukan hanya dari pengalaman pendidik, tetapi juga tingkat dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik (guru) memegang peranan penting dalam mensukseskan tujuan pendidikan dalam mengembangkan segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Maka dari itu, guru harus memiliki kualifikasi yang memadai agar *output* dari pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualifikasi tenaga pendidik pada jenjang PAUD di Kota Bekasi dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih banyak guru PAUD yang belum sarjana (S1).

Masih banyaknya siswa yang mengulang baik pada SD Negeri maupun SD Swasta menjadi indikasi bahwa kualitas pembelajaran di sekolah masih harus ditingkatkan baik melalui penguatan kompetensi guru, penambahan sarana dan media pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat dan komite, maupun penciptaan lingkungan akademik yang memadai. Ketidakmampuan peserta didik mencapai prestasi belajar dengan tidak mengulang kelas tidaknya dipengaruhi oleh satu faktor semata, ada banyak faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal. Akan tetapi setidaknya faktor eksternal dapat menjadi stimulus bagi peserta didik untuk mampu menunjukkan prestasi yang diharapkan. Maka dari itu, figur seorang guru sebagai tenaga pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong, mendampingi, dan menguatkan peserta didik bahwa ia mampu untuk berprestasi.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kualifikasi tenaga pendidikan yang dipersyaratkan adalah Strata 1 (S1). Dalam praktiknya, masih ada sejumlah guru di Kota Bekasi yang belum memenuhi kualifikasi minimal tenaga pendidik. Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi Dinas Pendidikan yang ingin mewujudkan visinya sebagai yang *“Terdepan dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”* ketika kualifikasi dari tenaga pendidik yang ada belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pendidikan yang berkualitas salah satu penting penunjang keberhasilannya adalah kecakapan dan kemampuan dari tenaga pendidik.

4. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui Perbaikan dan Penambahan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan dan Laboratorium

Sarana prasarana pendidikan memberikan andil besar dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Sarana prasarana yang memadai memberikan kesempatan dan peluang bagi guru dan peserta didik untuk menggali dan

mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru serta memperluas pengetahuan yang ada. Maka dari itu, sarana prasarana yang bermutu harus diperhatikan secara serius agar prestasi belajar siswa meningkat serta suasana belajar sekolah berjalan secara kondusif. Sejumlah upaya dalam meningkatkan mutu sarana prasarana diantaranya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap ruang kelas yang rusak, penambahan ruang kelas baru, pemenuhan lab. IPA dan komputer, serta perpustakaan. Idealnya adalah satu sekolah memiliki satu laboratorium IPA untuk menunjang mata pelajaran sains di sekolah.

Dari keterpenuhan laboratorium komputer juga tidak jauh berbeda, dimana masih banyak SD Negeri maupun SD swasta yang belum memiliki laboratorium komputer. Fasilitas perpustakaan sekolah juga tidak jauh berbeda, masih banyak SD Negeri maupun SD Swasta di Kota Bekasi yang belum memiliki ruang perpustakaan sehingga perlu perbaikan segera bagi perpustakaan sekolah yang rusak dan penambahan ruang perpustakaan baru bagi sekolah yang belum memiliki.

5. Penguatan Kapasitas Manajemen Sekolah (*School Management Capacity*)

Peningkatan kapasitas manajemen sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengoptimalkan berbagai komponen sekolah yang bersinergi dengan masyarakat sekitar sekolah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada. Kapasitas manajemen sekolah memfokuskan pada penguatan peran kepala sekolah sebagai leader dan manajer, *profesional communitu learning* di tingkat sekolah yang dikembangkan secara berkelanjutan, pemanfaatan IT dalam pengelolaan dan kegiatan pembelajaran serta upaya pendampingan terpadu oleh supervisor (pengawas) satuan pendidikan baik dalam bidang manajerial maupun kegiatan pembelajaran.

6. Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan

Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan masih belum optimal, salah satu penyebabnya tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk disekolah milik pemerintah, dengan adanya Kenakalan remaja (Games Online), maupun terkendala Biaya Transport melebihi biaya sekolah, sehingga sebagian siswa terkendala bersekolah dan akhirnya putus sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan program beasiswa kepada siswa tidak mampu agar dapat tetap mengikuti proses belajar mengajar hingga waktu selesai.

7. Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka melanjutkan upaya penyederhanaan kurikulum yang diawali dengan Kurikulum Darurat, juga upaya penguatan karakter dan kompetensi yang sudah dimulai sejak kurikulum sebelumnya. Secara garis besar, kebaruan dari Kurikulum Merdeka adalah adanya: (1) pembelajaran yang lebih mendalam, tidak terburu-buru, sehingga setiap peserta didik dapat mencapai kompetensi minimum; (2)

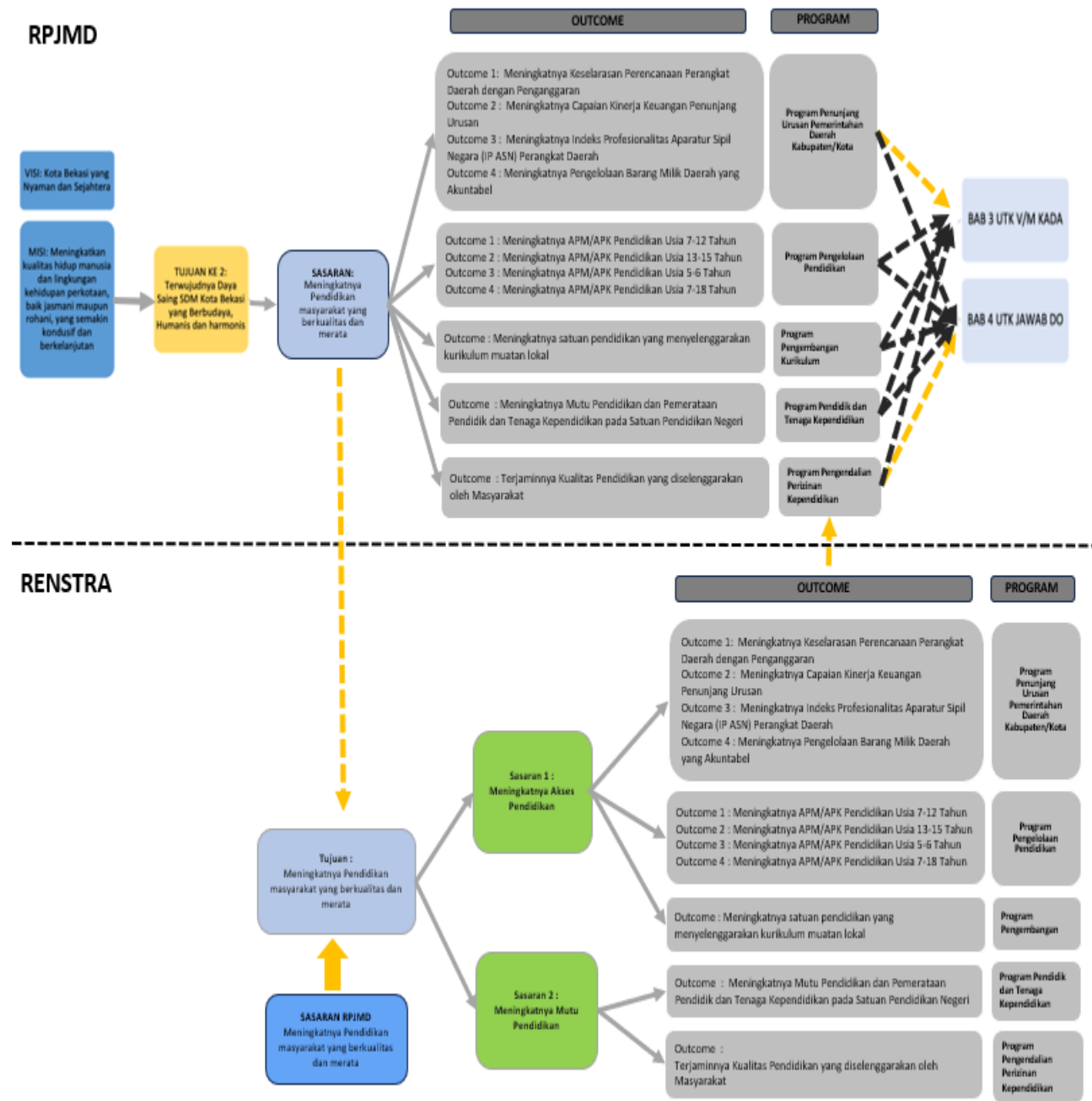
pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik; dan (3) pembelajaran melalui proyek untuk penguatan karakter dalam profil pelajar Pancasila.

Sebagai upaya pemulihan pembelajaran, implementasi Kurikulum Merdeka tidak diwajibkan. Satuan pendidikan dapat memilih tiga opsi dalam masa transisi, yaitu: tetap menggunakan Kurikulum 2013, menerapkan kurikulum darurat, atau meluncurkan Kurikulum Merdeka secara bertransformasi. Untuk Kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dapat mengimplementasikannya sesuai kesiapan masing-masing. Pemerintah menyediakan dukungan kebijakan dan teknis, termasuk berbagai sumber untuk guru dalam Platform Merdeka Mengajar. Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan mendukung dan memfasilitasi satuan pendidikan untuk menentukan pilihan kurikulum, mempelajari Kurikulum Merdeka, serta dalam proses mengimplementasikannya sesuai filosofi dari Kurikulum Merdeka ini.

8. Optimalisasi ICT (*Information and communication technologies*) sebagai *Decision Support System* dan *Executive Support System* dalam layanan Pendidikan yang berkualitas guna mendukung Smart School.

Mewujudkan *good governance* dan *Smart city* pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus didukung oleh kemampuan infrastruktur teknologi yang memadai dalam memperkuat layanan yang ada. Pemanfaatan teknologi dalam menunjang layanan Pendidikan di Kota Bekasi saat ini masih tergolong rendah, sejumlah layanan masih menggunakan cara konvensional sehingga efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik. ICT sebagai *decision support system* mendukung Smart School yang memberi peluang bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan layanan prima, sistematis, dan terintegrasi dengan instansi lain. Disamping itu, dukungan akan *executive support system* memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN



3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2025-2029 didasarkan atas rumusan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang terdapat di dalam RPJMD 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan, maka Dinas Pendidikan mempunyai tugas yang penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan Visi Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan.

Dalam Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah harus melaksanakan amanat pada RPJMD dengan perumusan tujuan, dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dengan penjabaran sebagai berikut:

3.2.a Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinamisasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga segenap *stakeholder* pendidikan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi diantaranya: 1) Kurangnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang merata serta terjangkau masih menjadi masalah, di mana kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan masih belum optimal. 2) Perluasan dan akses pendidikan masih belum merata, ditandai dengan kebutuhan akan unit sekolah baru, perbaikan serta penambahan ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang belum terpenuhi. Selain itu, angka siswa putus sekolah masih tinggi; 3) Mutu dan daya saing pendidikan masih rendah karena kurangnya linearitas tenaga pendidik, kualifikasi pendidikan yang belum sesuai, dan akreditasi sekolah yang belum optimal. Selain itu, relevansi pendidikan non-formal masih kurang, dan peran pengawas serta masyarakat belum dioptimalkan serta 4) Kualitas layanan pendidikan belum memuaskan akibat kurangnya sinergitas kebijakan dan program, pemanfaatan ICT yang belum maksimal, kebutuhan akan payung hukum pendidikan yang belum terpenuhi, dan keterlibatan komite sekolah yang masih minim.

Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi menetapkan tujuan Jangka Menengah 2025–2029 yaitu :

“Meningkatnya Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata”

3.2.b Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki komitmen bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau agar segenap potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal dan dapat berkontribusi dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025–2029 dirumuskan ulang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Pendidikan
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.



Tabel 3.1
Perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata		Harapan Lama Sekolah	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43	
			Rata-rata skor Literasi dan Numerasi siswa 7-15 Tahun	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18	
		1. Meningkatnya Akses Pendidikan	APK Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	
			APM Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	
			Iklim Keamanan SD	77,11	78,01	78,91	79,81	80,71	81,61	
			Iklim Kebhinekaan SD	73,72	74,72	75,72	76,72	77,72	78,72	
			Iklim Inklusifitas SD	63,27	65,77	68,27	70,77	73,27	75,77	
			Iklim Keamanan SMP	74,42	75,92	77,42	78,92	80,42	81,92	
			Iklim Kebhinekaan SMP	72,93	73,93	74,93	75,93	76,93	77,93	
			Iklim Inklusifitas SMP	63,7	66,1	68,5	70,9	73,9	75,7	
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Skor Literasi/ Numerasi							
			• Skor Literasi SD	88,00	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50	
			• Skor Literasi SMP	87,00	87,10	87,20	87,30	87,40	87,50	
			• Skor Numerasi SD	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90	80,00	
			• Skor Numerasi SMP	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,70	
			Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	38,73	39,63	40,53	41,43	42,33	43,23	

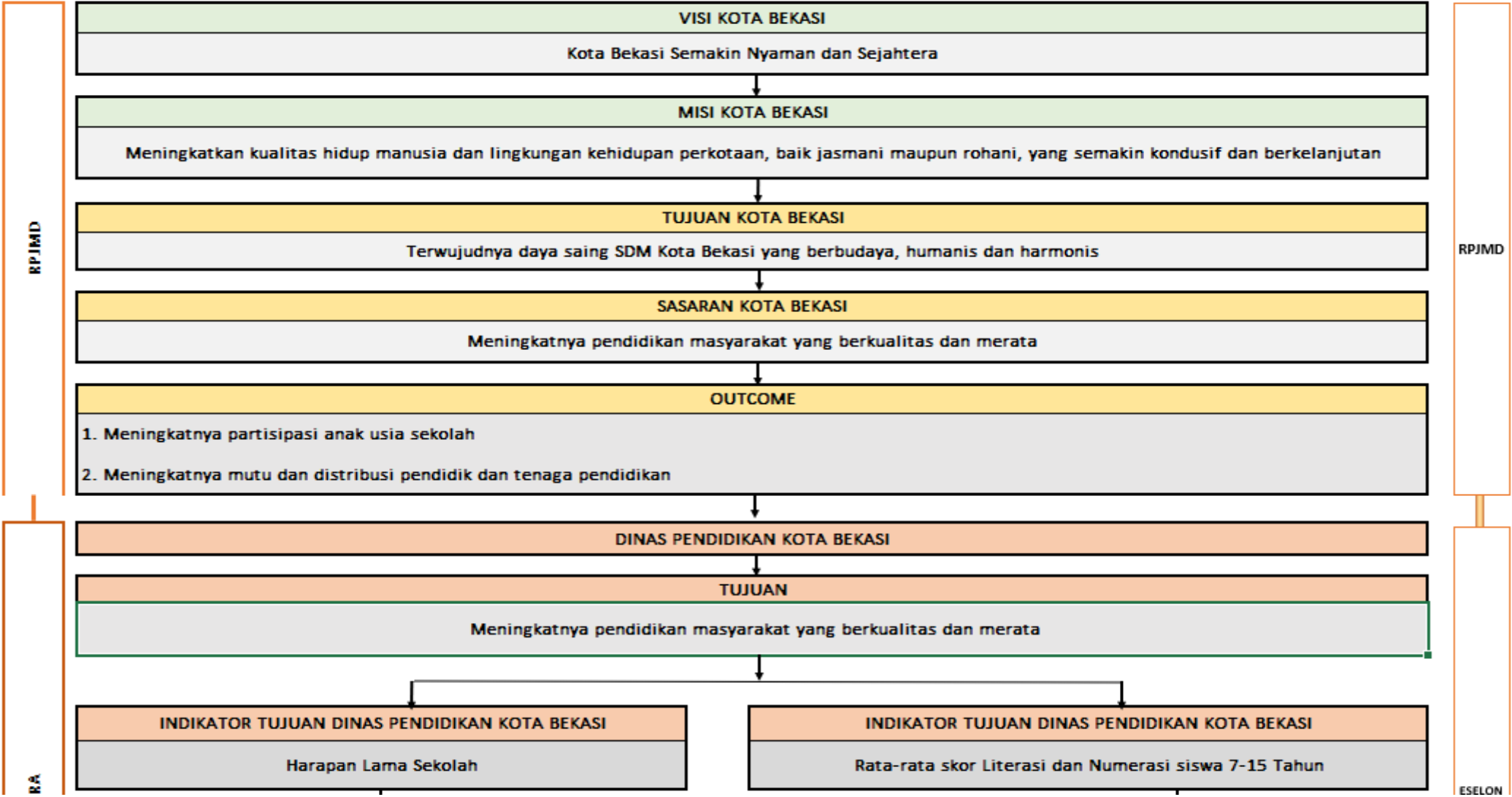
Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

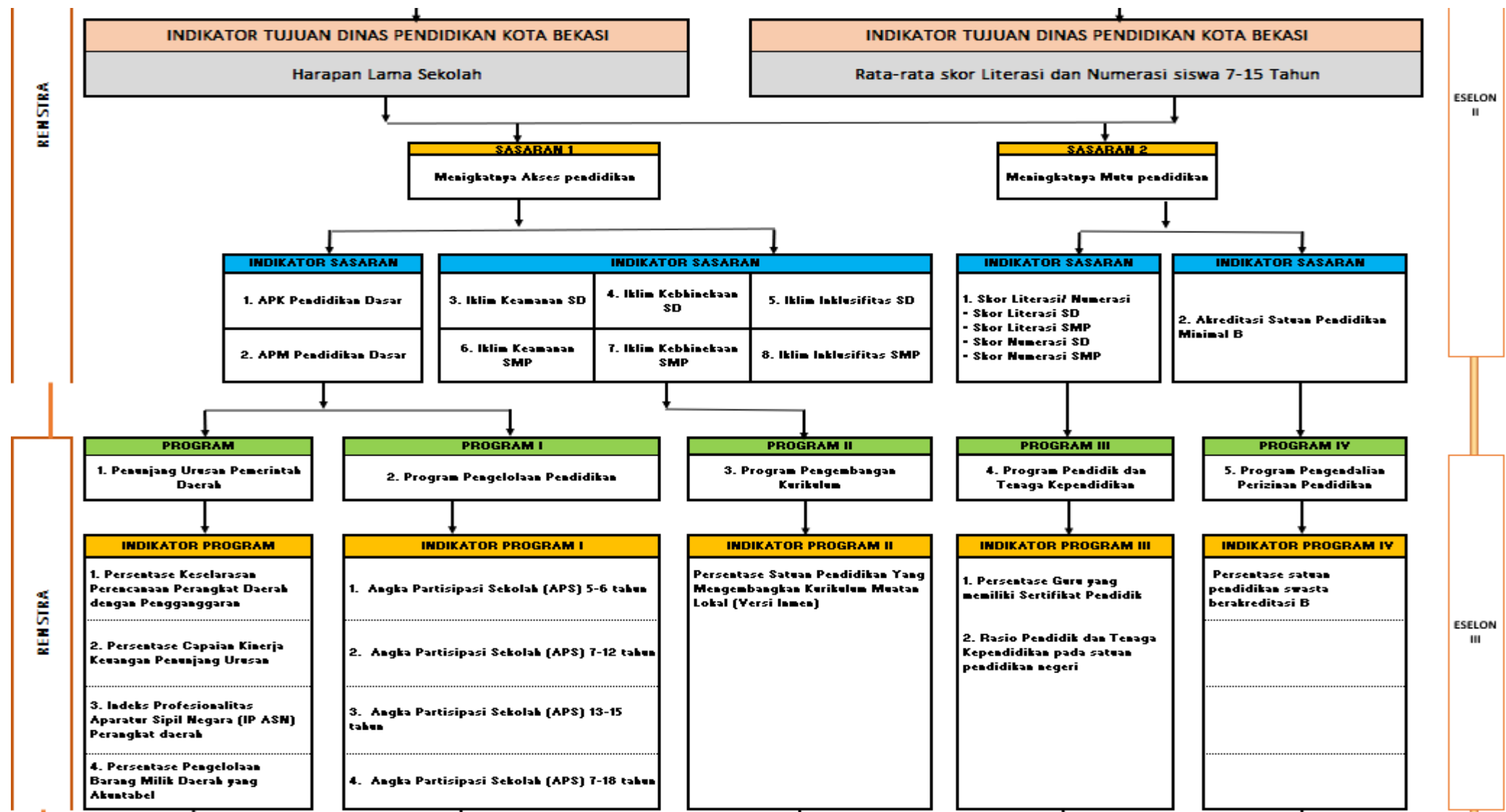
Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Masalah perizinan izin pendirian satuan pendidikan juga diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Untuk pendidikan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin diberikan oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk izin pendidikan sekolah dasar, PAUD, dan nonformal, izin diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.



Tabel 3.3
CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029







3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Bahasan tentang strategi dan arah kebijakan tersebut akan menunjukkan cara Dinas Pendidikan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yg menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan untuk merumuskan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu cara yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain itu menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang. Untuk menyusun strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal antara lain:

- a. Analisis *Logical Frame Work* melalui *Focus Group Disscusion* yang melibatkan stakeholder Internal dan Eksternal.
- b. Analisis *Cascade down* dan pohon kinerja.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai metode sehingga diperoleh formulasi strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam menyusun dan melaksanakan program di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

	VISI KOTA BEKASI
	<i>Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera</i>
	MISI KOTA BEKASI
	<i>Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin</i>
	TUJUAN KOTA BEKASI
	<i>Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis.</i>
	SASARAN KOTA BEKASI
	<i>Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata</i>



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	<i>Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata</i>	1. Meningkatnya Akses Pendidikan	Optimalisasi pelayanan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan bagi masyarakat & kemitraan dengan berbagai stakeholder pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses dan kualitas pendidikan baik formal / non formal
			Pemberian Bea siswa dan subsidi pendidikan bagi siswa keluarga miskin	
			Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, minat bakat dan tahfidz al-Qur'an Pengembangan pendidikan inklusi	
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Optimalisasi pelayanan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (Sekolah Swasta)	Peningkatan kualitas manajemen pendidikan (Akreditasi/ ijin mendirikan sekolah baru)
			Optimalisasi pembangunan sekolah baru di jenjang SMP yang dikelola pemerintah	Peningkatan kuantitas sekolah baru jenjang SMP yang dikelola pemerintah
			Optimalisasi pembinaan penelusuran minat dan bakat siswa	•Peningkatan kuantitas event kejuaraan di bidang akademis dan non akademis di tingkat Kota • Peningkatan kualitas prasarana pendukung
			Optimalisasi Pelayanan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan kualitas manajemen pendidikan (akreditasi/ijin mendirikan sekolah baru)
			Optimalisasi peran masyarakat dan dunia usaha/ industri untuk membantu dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan	• Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jalur • Pembuatan Peraturan walikota untuk peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
			Optimalisasi pendanaan melalui pemberian bantuan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah	Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang Pendidikan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 3.4
Penahapan Pembangunan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perluasan Akses Pendidikan dan Kesehatan	1. Perluasan Akses Pendidikan dan Kesehatan 2. Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital	Perluasan Pendidikan vokasi	Perluasan Pendidikan vokasi	Peningkatan Produktivitas SDM

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan dasar urusan pendidikan di Kota Bekasi, maka perlu menyusun rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penyusunan rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, sasaran dan pendanaan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program strategisnya sebagai berikut :

BLU

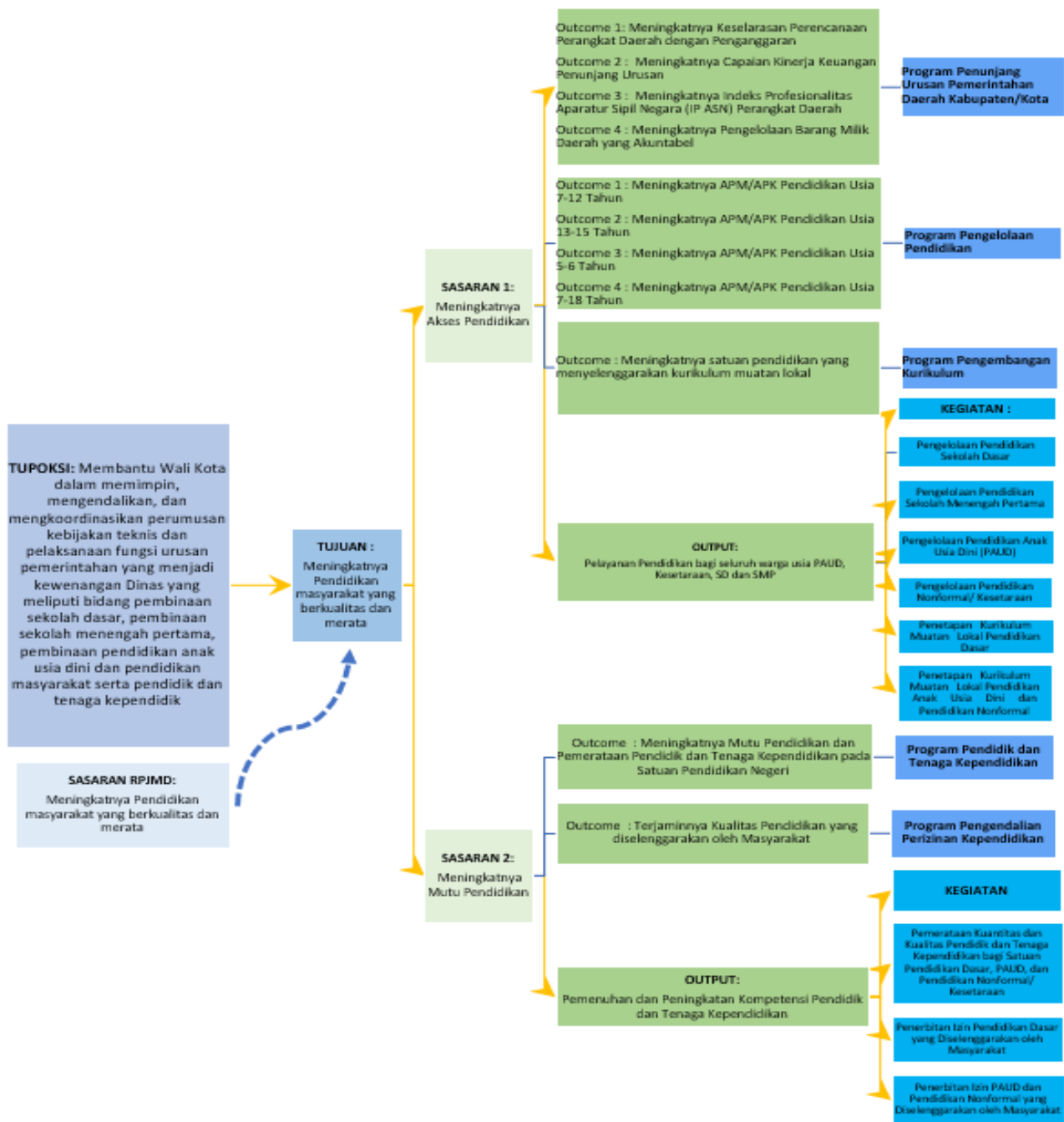
1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidikan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

BLPU

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Dalam menjalankan program prioritas, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menetapkan kegiatan prioritas yang harus dilakukan selama 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pendidikan Kota Bekasi membagi ke dalam 2 (dua) jenis kegiatan prioritas yaitu 1) *Basic Office*, dan 2) *Basic Activity*. *Basic Office* merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur, sarana prasarana, penyelenggaraan pembiayaan operasional kantor. *Basic Activity* merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata		Masyarakat Kota Bekasi cerdas berpendidikan minimal 12 tahun		1 Harapan Lama Sekolah		
					2 Rata-rata skor Literasi dan Numerasi siswa 7-15 Tahun		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Meningkatnya Akses Pendidikan		Pelayanan Pendidikan bagi seluruh warga usia PAUD, Kesetaraan, SD dan SMP	1 APK Pendidikan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		2. APM Pendidikan Dasar	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Outcome 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Outcome 3 : Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Outcome 4 : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Outcome 1 : Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 7- 12 Tahun			1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengadaan Mebel Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			Outcome 2 : Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 13-15 Tahun			2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pengadaan Mebel Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Outcome 3 : Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 5-6 Tahun			3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
						Pengadaan Mebel PAUD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			Outcome 4 : Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 7-18 Tahun			4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Outcome : Meningkatnya satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal		3 Iklim Keamanan SD	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					4. Iklim Kebhinekaan SD	1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					5. Iklim Inklusifitas SD	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					6. Iklim Keamanan	2 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					SMP	dan Pendidikan Nonformal	
					7. Iklim Kebhinekaan SMP	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					8. Iklim Inklusifitas SMP		
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Outcome : Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Skor Literasi/ Numerasi	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					• Skor Literasi SD	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
					• Skor Literasi SMP	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
					• Skor Numerasi SD	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
					• Skor Numerasi SMP		
			Outcome : Terjaminnya Kualitas Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat		2. Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
						1 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						2 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

Penjabaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program strategisnya adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		DINAS PENDIDIKAN				1.960.994.370.270		1.678.385.502.422		1.772.558.321.902		1.859.219.055.823		1.878.128.726.148		1.888.513.482.341		11.037.799.458.906	
1,01,01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	1.364.412.057.982	-	1.115.587.106.000	-	1.171.366.461.300	-	1.229.934.784.365	-	1.236.084.458.287	-	1.239.792.711.662	-	7.357.177.579.596	
		Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	598.130.000	100%	275.000.000	100%	288.750.000	100%	303.187.500	100%	304.703.438	100%	305.617.548	100%	2.075.388.485	
1.01.01.2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		4 Dokumen	598.130.000	4 Dokumen	275.000.000	4 Dokumen	288.750.000	4 Dokumen	303.187.500	4 Dokumen	304.703.438	4 Dokumen	305.617.548	20 Dokumen	2.075.388.485	
1.01.01.2.01.0001		Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Output: Ditetapkannya Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	573.130.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	262.500.000	2 Dokumen	275.625.000	2 Dokumen	277.003.125	2 Dokumen	277.834.134	10 Dokumen	1.916.092.259	
1.01.01.2.01.0006		Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
		Output: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	26.250.000	2 Laporan	27.562.500	2 Laporan	27.700.313	2 Laporan	27.783.413	10 Laporan	159.296.226	
		Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		91,81%	1.360.576.961.685	91,91%	1.111.562.986.000	92,01%	1.167.141.135.300	92,11%	1.225.498.192.065	92,21%	1.231.625.683.025	92,31%	1.235.320.560.074		7.331.725.518.150	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.01.2.02		Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK,	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		3 Laporan	1.190.130.785.000	3 Laporan	1.046.918.005.000	3 Laporan	1.099.263.905.250	3 Laporan	1.154.227.100.513	3 Laporan	1.159.998.236.015	3 Laporan	1.163.478.230.723	15 Laporan	6.814.016.262.501	
1.01.01.2.02.0001		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5100 Orang /bulan	1.190.085.785.000	5100 Orang/bulan	1.046.853.005.000	5100 Orang /bulan	1.099.195.655.250	5100 Orang /bulan	1.154.155.438.013	5100 Orang /bulan	1.159.926.215.203	5100 Orang /bulan	1.163.405.993.848	25.500 Orang /bulan	6.813.622.092.313	
1.01.01.2.02.0005		Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Output: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.750.000	1 Laporan	16.537.500	1 Laporan	16.620.188	1 Laporan	16.670.048	5 Laporan	95.577.736	
1.01.01.2.02.0007		Sub Kegiatan 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
		Output: Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	30.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	52.500.000	18 Laporan	55.125.000	18 Laporan	55.400.625	18 Laporan	55.566.827	90 Laporan	298.592.452	
1.01.01.2.08		Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Output: Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		8 Laporan	168.658.310.685	8 Laporan	62.900.000.000	8 Laporan	66.045.000.000	8 Laporan	69.347.250.000	8 Laporan	69.693.986.250	8 Laporan	69.903.068.209	40 Laporan	506.547.615.144	
1.01.01.2.08.0002		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	945.000.000	3 Laporan	992.250.000	3 Laporan	997.211.250	3 Laporan	1.000.202.884	15 Laporan	5.734.664.134	
1.01.01.2.08.0004		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	167.758.310.685	5 Laporan	62.000.000.000	5 Laporan	65.100.000.000	5 Laporan	68.355.000.000	5 Laporan	68.696.775.000	5 Laporan	68.902.865.325	25 Laporan	500.812.951.010	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.01.2.06		Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		13 Laporan	1.787.866.000	13 Laporan	1.744.981.000	13 Laporan	1.832.230.050	13 Laporan	1.923.841.553	13 Laporan	1.933.460.760	13 Laporan	1.939.261.143	65 Laporan	11.161.640.505	
1.01.01.2.06.0001		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	24.981.000	1 Paket	24.981.000	1 Paket	26.230.050	1 Paket	27.541.553	1 Paket	27.679.260	1 Paket	27.762.298	5 Paket	159.175.161	
1.01.01.2.06.0004		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
		Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	750.000.000	3 Paket	750.000.000	3 Paket	787.500.000	3 Paket	826.875.000	3 Paket	831.009.375	3 Paket	833.502.403	15 Paket	4.778.886.778	
1.01.01.2.06.0005		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
		Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	157.500.000	2 Paket	165.375.000	2 Paket	166.201.875	2 Paket	166.700.481	10 Paket	955.777.356	
1.01.01.2.06.0006		Sub Kegiatan 4: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
		Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	55.400.625	1 Dokumen	55.566.827	5 Dokumen	318.592.452	
1.01.01.2.06.0008		Sub Kegiatan 5: Fasilitas Kunjungan Tamu																	
		Output: Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	22.050.000	1 Laporan	22.160.250	1 Laporan	22.226.731	5 Laporan	127.436.981	
1.01.01.2.06.0009		Sub Kegiatan 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	646.815.000	2 Laporan	600.000.000	2 Laporan	630.000.000	2 Laporan	661.500.000	2 Laporan	664.807.500	2 Laporan	666.801.923	10 Laporan	3.869.924.423	
1.01.01.2.06.0010		Sub Kegiatan 7: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
		Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	146.070.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	157.500.000	1 Dokumen	165.375.000	1 Dokumen	166.201.875	1 Dokumen	166.700.481	5 Dokumen	951.847.356	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah		88,4	185.000.000	88,42	50.000.000	88,44	52.500.000	88,46	55.125.000	88,48	55.400.625	88,5	55.566.827		453.592.452	
1.01.01.2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		3 Laporan	185.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	52.500.000	3 Laporan	55.125.000	3 Laporan	55.400.625	3 Laporan	55.566.827	15 Laporan	453.592.452	
1.01.01.2.05.0002		Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		Output: Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	100.000.000	0	0	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000		200.000.000	
1.01.01.2.05.0009		Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		23 Orang	85.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	27.500.000	25 Orang	30.125.000	25 Orang	30.400.625	25 Orang	30.566.827	125 Orang	253.592.452	
		Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		94,40%	3.051.966.297	94,59%	3.699.120.000	94,77%	3.884.076.000	94,96%	4.078.279.800	95,15%	4.098.671.199	95,33%	4.110.967.213		22.923.080.509	
1.01.01.2.07		Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-														
		Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan		2 Laporan	1.482.468.000	2 Laporan	2.000.000.000	2 Laporan	2.100.000.000	2 Laporan	2.205.000.000	2 Laporan	2.216.025.000	2 Laporan	2.222.673.075	10 Laporan	12.226.166.075	
1.01.01.2.07.0005		Sub Kegiatan 1: Pengadaan Mebel																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		242 Unit	432.744.000	200 Unit	1.000.000.000	200 Unit	1.050.000.000	200 Unit	1.102.500.000	200 Unit	1.058.400.000	200 Unit	1.007.166.825	1000 Unit	5.650.810.825	
1.01.01.2.07.0006		Sub Kegiatan 2: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		79 Unit	1.049.724.000	20 Unit	1.000.000.000	20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.102.500.000	20 Unit	1.157.625.000	20 Unit	1.215.506.250	100 Uniit	6.575.355.250	
1.01.01.2.09		Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		4 Laporan	1.569.498.297	4 Laporan	1.699.120.000	4 Laporan	1.784.076.000	4 Laporan	1.873.279.800	4 Laporan	1.882.646.199	4 Laporan	1.888.294.138	4 Laporan	10.696.914.434	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.01. 2.09.000 1		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	300.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	315.000.000	6 Unit	330.750.000	6 Unit	332.403.750	6 Unit	333.400.961	30 Unit	1.911.554.711	
1.01.01. 2.09.000 2		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	100.000.000	11 Unit	100.000.000	11 Unit	105.000.000	11 Unit	110.250.000	11 Unit	110.801.250	11 Unit	111.133.654	55 Unit	637.184.904	
1.01.01.2. 09.0006		Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		150 Unit	299.120.000	150 Unit	299.120.000	150 Unit	314.076.000	150 Unit	329.779.800	150 Unit	331.428.699	150 Unit	332.422.985	750 Unit	1.905.947.484	
1.01.01. 2.09.000 9		Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
		Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	870.378.297	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.050.000.000	1 Unit	1.102.500.000	1 Unit	1.108.012.500	1 Unit	1.111.336.538	5 Unit	6.242.227.335	
		BLU (BELANJA LANGSUNG URUSAN)			59 Laporan	596.582.312.288	58 Laporan	562.798.396.422	57 Laporan	601.191.860.602	57 Laporan	629.284.271.458	57 Laporan	642.044.267.861	57 Laporan	648.720.770.679	338 Laporan	3.680.621.879.310	
1,01,02	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			53 Laporan	592.320.488.988	52 Laporan	557.475.947.535	51 Laporan	595.609.248.863	51 Laporan	623.697.381.282	51 Laporan	636.171.328.908	51 Laporan	642.533.042.198	309 Laporan	3.647.807.437.774	
		Outcome 1 : Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 7-12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (SD)		99,75		99,90		100,00		100,00		100,00		100,00				
1.01.02. 2.01		Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
		Output: Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang di kelola		15 Laporan	335.939.771.300	17 Laporan	306.501.519.435	16 Laporan	327.319.625.795	16 Laporan	340.494.999.601	16 Laporan	347.304.899.593	16 Laporan	350.777.948.589	96 Laporan	2.008.338.764.314	
1.01.02.2. 01.0014		Sub Kegiatan 1: Pengadaan Mebel Sekolah																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		50 Paket	2.000.000.000	2 Paket	10.000.000.000	4800 Set	10.700.000.000	4800 Set	11.449.000.000	4800 Set	11.677.980.000	4800 Set	11.794.759.800	2400 Set	57.621.739.800	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2. 01.0016		Sub Kegiatan 2: Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		315 Paket	51.254.311.000	320 Paket	2.025.000.000	320 Paket	2.166.750.000	320 Paket	2.318.422.500	320 Paket	2.364.790.950	6 Paket	2.388.438.860	1600 Paket	62.517.713.310	
1.01.02. 2.01.001 9		Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
		Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		239 Unit	23.321.280.800	315 Unit	20.786.599.435	315 Unit	22.241.661.395	315 Unit	23.798.577.693	315 Unit	24.274.549.247	6 Paket	24.517.294.739	1.575 Unit	138.939.963.310	
1.01.02.2. 01.0025		Sub Kegiatan 4: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		376 Peserta Didik	2.760.000.000	410 Peserta Didik	2.000.000.000	410 Peserta Didik	2.140.000.000	410 Peserta Didik	2.289.800.000	410 Peserta Didik	2.335.596.000	410 Peserta Didik	2.358.951.960	2050 Peserta Didik	13.884.347.960	
1.01.02. 2.01.002 6		Sub Kegiatan 5: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				752 Orang	2.500.000.000	752 Orang	2.675.000.000	752 Orang	2.862.250.000	752 Orang	2.919.495.000	752 Orang	2.948.689.950	3755 Orang	13.905.434.950	
1.01.02. 2.01.002 7		Sub Kegiatan 6: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
		Output: Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		2114 Orang	2.096.259.500										-	2114 Orang	2.096.259.500	
1.01.02.2. 01.0028		Sub Kegiatan 7: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		386 Satuan Pendidik an	16.882.660.000	350 Satuan Pendidik an	19.341.000.000	350 Satuan Pendidik an	20.694.870.000	350 Satuan Pendidikan	22.143.510.900	350 Satuan Pendidik an	22.586.381.118	350 Satuan Pendidik an	22.812.244.929	1750 Satuan Pendidik an	124.460.666.947	
1.01.02.2. 01.0029		Sub Kegiatan 8: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
		Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		572 Satuan Pendidik an	216.348.920.000	567 Satuan Pendidik an	216.348.920.000	572 Satuan Pendidik an	231.493.344.400	572 Satuan Pendidikan	247.697.878.508	572 Satuan Pendidik an	252.651.836.078	572 Satuan Pendidik an	255.178.354.439	2.860 Satuan Pendidik an	1.419.719.253.425	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.01.0030		Sub Kegiatan 9: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
		Output: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		572 Orang	250.000.000	317 Orang	150.000.000	317 Orang	160.500.000	317 Orang	171.735.000	317 Orang	175.169.700	317 Orang	176.921.397	1585 orang	1.084.326.097	
1.01.02.2.01.0035		Sub Kegiatan 10: Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		317 Orang	425.566.000	317 Orang	300.000.000	317 Orang	321.000.000	317 Orang	343.470.000	317 Orang	350.339.400	317 Orang	353.842.794	1,585 Orang	2.094.218.194	
1.01.02.2.01.0036		Sub Kegiatan 11: Pengembangan konten digital untuk pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		317 Konten Digital	1.000.000.000	317 Konten Digital	1.000.000.000	317 Konten Digital	1.070.000.000	317 Konten Digital	1.144.900.000	317 Konten Digital	1.167.798.000	317 Konten Digital	1.179.475.980	1585 Konten	6.562.173.980	
1.01.02.2.01.0037		Sub Kegiatan 12: Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		250 Orang	500.000.000	250 Orang	500.000.000	250 Orang	535.000.000	250 Orang	572.450.000	250 Orang	583.899.000	250 Orang	589.737.990	1250 Orang	3.281.086.990	
1.01.02.2.01.0038		Sub Kegiatan 13: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		2 Dokume n	484.750.000	60 Dokume n	500.000.000	60 Dokume n	535.000.000	60 Dokumen	572.450.000	60 Dokume n	583.899.000	60 Dokume n	589.737.990	300 Dokume n	3.265.836.990	
1.01.02.2.01.0039		Sub Kegiatan 14: Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokume n	300.000.000	2 Dokume n	300.000.000	2 Dokume n	321.000.000	2 Dokumen	343.470.000	2 Dokume n	350.339.400	2 Dokume n	353.842.794	10 Dokume n	1.968.652.194	
1.01.02.2.01.0043		Sub Kegiatan 15: Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																	
		Output: Terlaksananya Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan				1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	321.000.000	1 Kegiatan	343.470.000	1 Kegiatan	350.339.400	1 Kegiatan	353.842.794	5 Kegiatan	1.668.652.194	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2030		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		dan intoleransi	intoleransi																
1.01.02.2.01.0049		Sub Kegiatan 16: Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk PeningkatanKapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				650 Orang	3.450.000.000	650 Orang	3.691.500.000	650 Orang	3.949.905.000	650 Orang	4.028.903.100	650 Orang	4.069.192.131	3250 Orang	19.189.500.231	
1.01.02.2.01.0050		Sub Kegiatan 17: Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
		Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		1340 Satuan Pendidik an	15.416.024.000	400 Satuan Pendidik an	15.000.000.000	400 Satuan Pendidik an	16.050.000.000	400 Satuan Pendidikan	17.173.500.000	400 Satuan Pendidik an	17.516.970.000	400 Satuan Pendidik an	17.692.139.700	800 Satuan Pendidik an	98.848.633.700	
1.01.02.2.01.0054		Sub Kegiatan 18: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		1,200 Peserta Didik	2.900.000.000	600 Peserta Didik	12.000.000.000	600 Peserta Didik	12.203.000.000	600 Peserta Didik	3.320.210.000	600 Peserta Didik	3.386.614.200	600 Peserta Didik	3.420.480.342	3000 Peserta Didik	37.230.304.542	
		Outcome 2: Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 13-15 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun (SMP)		99,75		99,90		100,00		100,00		100,00		100,00				
1.01.02.2.02		Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			17 Laporan	195.299.236.588	17 Laporan	188.157.810.000	17 Laporan	201.208.341.701	17 Laporan	213.327.670.618	17 Laporan	217.594.224.031	17 Laporan	219.770.166.272	85 Laporan	1.235.357.449.210	
1.01.02.2.02.0025		Sub Kegiatan 1: Pengadaan Mebel Sekolah																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		5 Paket	2.500.000.000	6 Paket	8.000.000.000	6 Paket	8.560.000.000	6 Paket	9.159.200.000	6 Paket	9.342.384.000	6 Paket	9.435.807.840	30 Paket	46.997.391.840	
1.01.02.2.02.0027		Sub Kegiatan 2: Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		3 Paket	16.019.984.184	4 Paket	6.000.000.000	4 Paket	6.420.000.000	4 Paket	6.869.400.000	4 Paket	7.006.788.000	4 Paket	7.076.855.880	20 Paket	49.393.028.064	
1.01.02.2.02.0030		Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
		Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		56 Unit	20.112.400.000	61 Unit	19.000.000.000	61 Unit	20.330.000.000	61 Unit	21.753.100.000	61 Unit	22.188.162.000	61 Unit	22.410.043.620	305 Unit	125.793.705.620	
1.01.02.2.02.0032		Sub Kegiatan 4: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		5500 Peserta Didik	3.700.000.000	1100 Peserta Didik	5.564.500.000	1100 Peserta Didik	5.833.500.001	1100 Peserta Didik	4.276.589.999	1100 Peserta Didik	4.362.121.800	1100 Peserta Didik	4.405.743.018	5500 Peserta Didik	28.142.454.818	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.02.0038		Sub Kegiatan 5: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		150 Peserta Didik	2.650.000.000	300 Peserta Didik	2.650.000.000	300 Peserta Didik	2.835.500.000	300 Peserta Didik	3.033.985.000	300 Peserta Didik	3.094.664.700	300 Peserta Didik	3.125.611.347	1500 Peserta Didik	17.389.761.047	
1.01.02.2.02.0039		Sub Kegiatan 6: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				200 Orang	2.500.000.000	200 Orang	2.675.000.000	200 Orang	2.862.250.000	200 Orang	2.919.495.000	200 Orang	2.948.689.950	1000 Orang	13.905.434.950	
1.01.02.2.02.0040		Sub Kegiatan 7: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
		Output: Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		2175 Orang	1.600.000.000				-		-		-		-	2175 Orang	1.600.000.000	
1.01.02.2.02.0041		Sub Kegiatan 8: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		623 Satuan Pendidik an	14.623.800.000	62 Satuan Pendidik an	6.229.500.000	62 Satuan Pendidik an	6.665.565.000	62 Satuan Pendidikan	7.132.154.550	62 Satuan Pendidik an	7.274.797.641	62 Satuan Pendidik an	7.347.545.617	310 Satuan Pendidik an	49.273.362.808	
1.01.02.2.02.0042		Sub Kegiatan 9: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
		Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		270 Satuan Pendidik an	113.477.810.000	218 Satuan Pendidik an	113.477.810.000	218 Satuan Pendidik an	121.421.256.700	218 Satuan Pendidikan	129.920.744.669	218 Satuan Pendidik an	132.519.159.562	218 Satuan Pendidik an	133.844.351.158	1.090 Satuan Pendidik an	744.661.132.089	
1.01.02.2.02.0043		Sub Kegiatan 10: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
		Output Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		436 Orang	200.000.000	60 Orang	150.000.000	60 Orang	160.500.000	60 Orang	171.735.000	60 Orang	175.169.700	60 Orang	176.921.397	300 Orang	1.034.326.097	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.02.0047		Sub Kegiatan 11: Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama																	
		Output: Terlaksananya Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi		60 Orang	150.000.000				-		-		-		-	60 Orang	150.000.000	
1.01.02.2.02.0048		Sub Kegiatan 12: Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		60 Orang	489.995.000	150 Orang	300.000.000	150 Orang	321.000.000	150 Orang	343.470.000	150 Orang	350.339.400	150 Orang	353.842.794	60 Orang	2.158.647.194	
1.01.02.2.02.0049		Sub Kegiatan 13: Pengembangan konten digital untuk pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		3 Konten Digital	500.000.000	3 Konten Digital	250.000.000	3 Konten Digital	267.500.000	3 Konten Digital	286.225.000	3 Konten Digital	291.949.500	3 Konten Digital	294.868.995	15 Konten Digital	1.890.543.495	
1.01.02.2.02.0050		Sub Kegiatan 14: Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	267.500.000	100 Orang	286.225.000	100 Orang	291.949.500	100 Orang	294.868.995	100 Orang	1.640.543.495	
1.01.02.2.02.0051		Sub Kegiatan 15: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		62 Dokume n	384.250.000	3 Dokume n	250.000.000	3 Dokume n	267.500.000	3 Dokumen	286.225.000	3 Dokume n	291.949.500	3 Dokume n	294.868.995	310 Dokume n	1.774.793.495	
1.01.02.2.02.0055		Sub Kegiatan 16: Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																	
		Output: Terlaksananya Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1 Kegiatan	400.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	321.000.000	2 Kegiatan	343.470.000	2 Kegiatan	350.339.400	2 Kegiatan	353.842.794	10 Kegiatan	2.068.652.194	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2030		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.02.0058		Sub Kegiatan 17: Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
		Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		56 Satuan Pendidik an	16.740.997.404	61 Satuan Pendidik an	19.806.000.000	61 Satuan Pendidik an	21.192.420.000	61 Satuan Pendidikan	22.675.889.400	61 Satuan Pendidik an	23.129.407.188	61 Satuan Pendidik an	23.360.701.260	300 Satuan Pendidik an	126.905.415.252	
1.01.02.2.02.0060		Sub Kegiatan 18: Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				480 Orang	2.930.000.000	480 Orang	3.135.100.000	480 Orang	3.354.557.000	480 Orang	3.421.648.140	480 Orang	3.455.864.621	2400 Orang	16.297.169.761	
1.01.02.2.02.0067		Sub Kegiatan 19: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		56 Paket	1.500.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	535.000.000	3 Paket	572.450.000	3 Paket	583.899.000	3 Paket	589.737.990	68 Paket	4.281.086.990	
		Outcome 3: Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 5-6 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 tahun (PAUD) (Versi Inmen)		71,48		74,52		77,56		80,60		83,56		86,53				
1.01.02.2.03		Kegiatan 3: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			12 Laporan	45.967.226.100	12 Laporan	48.828.213.100	12 Laporan	52.141.188.017	12 Laporan	54.183.931.178	12 Laporan	55.267.609.802	12 Laporan	55.820.285.900	60 Laporan	312.208.454.097	
1.01.02.2.03.0007		Sub Kegiatan 1: Pengadaan Mebel PAUD																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		4 Paket	500.000.000	2 Paket	500.000.000	2 Paket	535.000.000	2 Paket	572.450.000	2 Paket	583.899.000	2 Paket	589.737.990	10 Paket	3.281.086.990	
1.01.02.2.03.0011		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		10860 Peserta Didik	2.219.913.100	7850 Peserta Didik	3.719.913.100	7850 Peserta Didik	3.875.307.017	7850 Peserta Didik	2.541.578.508	7850 Peserta Didik	2.592.410.078	7850 Peserta Didik	2.618.334.179	42260 Peserta Didik	17.567.455.983	
1.01.02.2.03.0015		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				30 Orang	720.000.000	30 Orang	770.400.000	30 Orang	824.328.000	30 Orang	840.814.560	30 Orang	849.222.706	150 Orang	4.004.765.266	
1.01.02.2.03.0017		Sub Kegiatan 4: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		662 Satuan Pendidik an	13.969.540.000	1073 Satuan Pendidik an	14.964.540.000	1073 Satuan Pendidik an	16.012.057.800	1073 Satuan Pendidikan	17.132.901.846	1073 Satuan Pendidik an	17.475.559.883	1073 Satuan Pendidik an	17.650.315.482	4954 Satuan Pendidik an	97.204.915.011	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.03.0018		Sub Kegiatan 5: Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
		Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP PAUD		952 Satuan Pendidik an	25.243.760.000	1073 Satuan Pendidik an	25.243.760.000	1073 Satuan Pendidik an	27.010.823.200	1073 Satuan Pendidikan	28.901.580.824	1073 Satuan Pendidik an	29.479.612.440	1073 Satuan Pendidik an	29.774.408.565	5254 Satuan Pendidik an	165.653.945.029	
1.01.02.2.03.0019		Sub Kegiatan 6: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
		Output: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		500 Orang	134.046.000	500 Orang	130.000.000	500 Orang	139.100.000	500 Orang	148.837.000	500 Orang	151.813.740	500 Orang	153.331.877	2500 Orang	857.128.617	
1.01.02.2.03.0021		Sub Kegiatan 7: Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																	
		Output: Terlaksananya Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi		138 Orang	180.000.000				-		-		-		-		180.000.000	
1.01.02.2.03.0022		Sub Kegiatan 8: Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50 Orang	180.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	107.000.000	50 Orang	114.490.000	50 Orang	116.779.800	50 Orang	117.947.598	250 Orang	736.217.398	
1.01.02.2.03.0023		Sub Kegiatan 9: Pengembangan konten digital untuk pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2 Konten Digital	180.000.000				-		-		-		-		180.000.000	
1.01.02.2.03.0024		Sub Kegiatan 10: Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		50 Orang	180.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	107.000.000	50 Orang	112.350.000	50 Orang	114.597.000	50 Orang	115.742.970	250 Orang	729.689.970	
1.01.02.2.03.0025		Sub Kegiatan 11: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		2 Dokume n	500.000.000,00	2 Dokume n	500.000.000	2 Dokume n	535.000.000	2 Dokumen	572.450.000	2 Dokume n	583.899.000	2 Dokume n	589.737.990	10 Dokume n	3.281.086.990	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.03.0039		Sub Kegiatan 12: Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	550.000.000	250 Orang	588.500.000	250 Orang	629.695.000	250 Orang	642.288.900	250 Orang	648.711.789	750 Orang	3.059.195.689	
1.01.02.2.03.0046		Sub Kegiatan 13: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		25 Paket	879.967.000	25 Paket	500.000.000	25 Paket	535.000.000	25 Paket	572.450.000	25 Paket	583.899.000	25 Paket	589.737.990	75 Paket	3.661.053.990	
1.01.02.2.03.0047		Sub Kegiatan 14: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																	
		Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD		12 Satuan Pendidikan	1.800.000.000	12 Satuan Pendidikan	1.800.000.000	12 Satuan Pendidikan	1.926.000.000	12 Satuan Pendidikan	2.060.820.000	12 Satuan Pendidikan	2.102.036.400	12 Satuan Pendidikan	2.123.056.764	60 Satuan Pendidikan	11.811.913.164	
		Outcome 4 : Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 7-18 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 tahun (non formal/ kesetaraan) (Versi Inmen)		21,17		25,27		29,37		33,47		37,57		41,67				
1.01.02.2.04		Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9 Laporan	15.114.255.000	6 Laporan	13.988.405.000	6 Laporan	14.940.093.350	6 Laporan	15.690.779.885	6 Laporan	16.004.595.482	6 Laporan	16.164.641.437	30 Laporan	91.902.770.154	
1.01.02.2.04.0010		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																	
		Output: Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		171 Peserta Didik	567.765.000	250 Peserta Didik	817.765.000	250 Peserta Didik	857.508.550	250 Peserta Didik	650.034.149	250 Peserta Didik	663.034.831	250 Peserta Didik	669.665.180	750 Peserta Didik	4.225.772.710	
1.01.02.2.04.0015		Sub Kegiatan 4: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																	
		Output: Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		350 Orang	520.000.000				-		-		-		-	350 Orang	520.000.000	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.02.2.04.0016		Sub Kegiatan 5: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
		Output: Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		60 Satuan Pendidik an	3.018.230.000	175 Satuan Pendidik an	2.934.980.000	175 Satuan Pendidik an	3.140.428.600	175 Satuan Pendidikan	3.360.258.602	175 Satuan Pendidik an	3.427.463.774	175 Satuan Pendidik an	3.461.738.412	300 Satuan Pendidik an	19.343.099.388	
1.01.02.2.04.0017		Sub Kegiatan 6: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
		Output: Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		47 Satuan Pendidik an	8.935.660.000	80 Satuan Pendidik an	8.935.660.000	80 Satuan Pendidik an	9.561.156.200	80 Satuan Pendidikan	10.230.437.134	80 Satuan Pendidik an	10.435.045.877	80 Satuan Pendidik an	10.539.396.335	367 Satuan Pendidik an	58.637.355.546	
1.01.02.2.04.0027		Sub Kegiatan 7: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
		Output: Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokume n	1.000.000.000				-			-		-		2 Dokume n	1.000.000.000	
1.01.02.2.04.0032		Sub Kegiatan 8: Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		Output: Tersedianya Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		400 Orang	500.000.000	400 Orang	500.000.000	400 Orang	525.000.000	400 Orang	551.250.000	400 Orang	562.275.000	400 Orang	567.897.750	2000 Orang	3.206.422.750	
1.01.02.2.04.0040		Sub Kegiatan 9: Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
		Output: Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		3 Paket	300.000.000	5 Paket	300.000.000	5 Paket	321.000.000	5 Paket	337.050.000	5 Paket	343.791.000	5 Paket	347.228.910	23 Paket	1.949.069.910	
1.01.02.2.04.0046		Sub Kegiatan 10: Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
		Output: Terselenggaranya Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar		354 Peserta Didik	272.600.000	263 Peserta Didik	500.000.000	263 Peserta Didik	535.000.000	263 Peserta Didik	561.750.000	263 Peserta Didik	572.985.000	263 Peserta Didik	578.714.850	1.406 Peserta Didik	3.021.049.850	
1.01.03	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					2 Lapran	1.022.448.887	2 Lapran	1.075.411.739	2 Lapran	1.137.355.456	2 Lapran	1.195.588.055	2 Lapran	1.259.671.575	10 Lapran	5.690.475.712	
		Outcome 5 : Meningkatnya satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		-		80		85		90		95		100				



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.01.03.201		Kegiatan 1: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				-	1 Laporan	722.448.887	1 Laporan	760.411.739	1 Laporan	806.605.456	1 Laporan	858.223.055	1 Laporan	918.932.925	5 Laporan	4.066.622.062	
1.01.03.201.002		Sub Kegiatan 1: Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
		Output: Tersusunnya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			-	12 Dokumen	Rp722.448.887	12 DOKUMEN	760.411.739	12 DOKUMEN	806.605.456	12 DOKUMEN	858.223.055	12 DOKUMEN	918.932.925	60 Dokumen	4.066.622.062	
1.01.03.202		Kegiatan 2: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				-	1 Laporan	Rp300.000.000	1 Laporan	Rp315.000.000	1 Laporan	Rp330.750.000	1 Laporan	Rp337.365.000	1 Laporan	Rp340.738.650	5 Laporan	Rp1.623.853.650	
1.01.03.202.0002		Sub Kegiatan 1: Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
		Sub Kegiatan 1: Tersusunnya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			-	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	315.000.000	4 Dokumen	330.750.000	4 Dokumen	337.365.000	4 Dokumen	340.738.650	20 Dokumen	1.623.853.650	
1,01,05	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			2 Laporan	1.149.280.000	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	841.440.000	2 Laporan	889.906.944	2 Laporan	935.470.180	2 Laporan	985.611.381	10 Laporan	5.601.708.505	
		Outcome 6 : Terjaminnya Kualitas Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan swasta berakreditasi B		75	80		85		90		95		100					
1.01.05.2.01		Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 Laporan	849.280.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	562.016.144	1 Laporan	601.021.564	1 Laporan	647.818.279	5 Laporan	3.695.135.987	
1.01.05.2.01.0002		Sub Kegiatan 1: Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
		Output: Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2 Dokumen	849.280.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	535.000.000	2 Dokumen	562.016.144	2 Dokumen	601.021.564	2 Dokumen	647.818.279	10 Dokumen	3.695.135.987	
1.01.05.2.02		Kegiatan 2 : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	306.440.000	1 Laporan	327.890.800	1 Laporan	334.448.616	1 Laporan	337.793.102	5 Laporan	1.906.572.518	
1.01.05.2.02.0001		Sub Kegiatan 1: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
		Output: Terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan		2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	306.440.000	2 Dokumen	327.890.800	2 Dokumen	334.448.616	2 Dokumen	337.793.102	10 Dokumen	1.906.572.518	



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Masyarakat	oleh Masyarakat																
1,01,04	5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			2 Laporan	3.112.543.300	2 Laporan	3.500.000.000	2 Laporan	3.665.760.000	2 Laporan	3.559.627.776	2 Laporan	3.741.880.718	2 Laporan	3.942.445.525	10 Laporan	21.522.257.319	
		Outcome 1: Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar		69		73		77		81		85		98				
			Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik		55		60		65		70		75		100%				
1.01.04.2.01		Kegiatan 1: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2 Laporan	3.112.543.300	2 Laporan	3.500.000.000	2 Laporan	3.665.760.000	2 Laporan	3.559.627.776	2 Laporan	3.741.880.718	2 Laporan	3.942.445.525	10 Laporan	21.522.257.319	
1.01.04.2.01.0001		Sub Kegiatan 1: Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		Output: Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		6 Dokumen	2.362.543.300	6 Dokumen	2.800.000.000	6 Dokumen	2.945.760.000	6 Dokumen	3.116.527.776	6 Dokumen	3.289.918.718	6 Dokumen	3.485.963.905	30 Dokumen	18.000.713.699	
1.01.04.2.01.0002		Sub Kegiatan 2: Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
		Output: Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	720.000.000	1 Laporan	443.100.000	1 Laporan	451.962.000	1 Laporan	456.481.620	5 Laporan	3.521.543.620	
J U M L A H						1.364.412.057.982		1.115.587.106.000		1.171.366.461.300		1.229.934.784.365		1.236.084.458.287		1.239.792.711.662		7.357.177.579.596	



Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM	PAGU INDIKATIF					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendidikan Istimewa Pengembangan Pendidikan Berkarakter	Program Pengelolaan Pendidikan	592.320	557.475	595.609	623.697	636.171	642.533
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.113	3.500	3.665	3.559	3.741	3.942

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/ PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	PAGU INDIKATIF					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA							
PN 4							
Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	45.967	48.828	52.141	54.183	55.267	55.820
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139
PROGRAM/PROYEK STRATEGIS NASIONAL							
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139



Program Prioritas Dinas Pendidikan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ada 2 Program dan 5 Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.6

Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Pendidikan	1 Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 7-12 Tahun	1 Pengelolaan SD/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	
		2 Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 13-15 Tahun	2 Pengelolaan SMP/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	
		3 Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 5-6 Tahun	3 Pengelolaan PAUD/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
		4 Meningkatnya APM/APK Pendidikan Usia 7-18 Tahun	4 Pengelolaan Nonformal/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan/ Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	

Dalam Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**), diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Cerdas, antara lain: peningkatan daya tampung sekolah SD tanpa biaya dan SMP dengan biaya terjangkau, perluasan PAUD dan anak berkebutuhan khusus; penerapan “two in one” pemanfaatan lahan dan gedung sekolah yang akan diterapkan pada sekolah terpadu di kecamatan bantargebang; pembangunan unit pembelajaran, dan peningkatan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Berikut Sub Kegiatan dan Sasaran Prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dan Sasaran Prioritas Dinas Pendidikan

NO	GERAKAN KOBE	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan



NO	GERAKAN KOB	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
	KOBE CERDAS	Tertampungnya seluruh anak usia sekolah di SD dengan tanpa biaya dan SMP dengan biaya terjangkau	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan
2	KOBE CERDAS	Meningkatnya daya tampung SMA/SMK di Kota Bekasi sesuai kebutuhan yang dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat sesuai kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Non Formal (Penyusunan FS Sekolah Taruna)	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3	KOBE CERDAS	Terbangunnya Kota Bekasi yang Ramah Anak dan fasilitasi pendidikan bagi anak usia dini maupun anak berkebutuhan khusus	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan (Hibah Sekolah Disabilitas)
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
	KOBE CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan Pendampingan	Dinas Pendidikan



NO	GERAKAN KOBES	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Pemberian layanan Pendampingan	Dinas Pendidikan
4	KOBES CERDAS	Diterapkannya pola “Two in One” pemanfaatan lahan dan gedung sekolah guna memperluas daya tampung sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Perkimtan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Perkimtan
5	KOBES CERDAS	Meningkatnya kualitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh SD dan SMP sebagai sarana pembelajaran Kesehatan siswa	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang UKS	Perkimtan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Pembangunan Ruang UKS	Perkimtan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan SMP	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan
	KOBES CERDAS		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan

Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Pendidikan dijabarkan pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8

Matriks Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Berdasarkan dokumen RPKD Tahun 2025-2029 dan RAT Penanggulangan Kemiskinan

Kota Bekasi Tahun 2025

No	STRATEGI	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
1	Pengurangan beban pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	



No	STRATEGI	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
		PENDIDIKAN	Usia Dini (PAUD)	PAUD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045 serta guna memastikan Pemerintah Daerah tetap melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) terkonvergen, Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah agar melakukan :

- Memastikan Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari :
 - ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - anak usia 0-23 bulan;
 - anak usia 24-59 bulan;
 - remaja putri;
 - calon pengantin;
 - keluarga dan masyarakat.
- Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing indikator layanan sebagai berikut:

RUMAH TANGGA MASYARAKAT

- Akses terhadap Air Minum Aman;
- Akses terhadap Sanitasi Aman;
- Kepemilikan JKN;
- Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
- Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

Dengan demikian kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Stunting pada Dinas Pendidikan dijabarkan pada tabel 4.9, sebagai berikut :



Tabel 4.9

Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Data Pendukung Layanan	Satuan	Base-line	Target						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Persentase Desa/ kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/ Kota	Persentase								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Persentase								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
		Persentase								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
2	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Persentase								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025 -2029 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

Fokus indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029. Indikator Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon III dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Walikota dan indikator kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 4.10
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
MISI
• Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai • Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan • Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi • Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat • Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya Visi, Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dituangkan secara rinci pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD KOTA BEKASI
(Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
			PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis.	Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Rata-rata skor Literasi dan Numerasi siswa 7-15 Tahun	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
		Harapan Lama Sekolah	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43



Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang pendidikan berkontribusi untuk menciptakan Pendidikan yang berkarakter dan berintegritas menjawab tantangan krisis multi dimensional untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya Visi Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata		Harapan Lama Sekolah	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43	
		Rata-rata skor Literasi dan Numerasi siswa 7-15 Tahun	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18	
	1. Meningkatnya Akses Pendidikan	APK Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	
		APM Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	
		Iklim Keamanan SD	77,11	78,01	78,91	79,81	80,71	81,61	
		Iklim Kebhinekaan SD	73,72	74,72	75,72	76,72	77,72	78,72	
		Iklim Inklusifitas SD	63,27	65,77	68,27	70,77	73,27	75,77	
		Iklim Keamanan SMP	74,42	75,92	77,42	78,92	80,42	81,92	
		Iklim Kebhinekaan SMP	72,93	73,93	74,93	75,93	76,93	77,93	
		Iklim Inklusifitas SMP	63,7	66,1	68,5	70,9	73,9	75,7	
	2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Skor Literasi/ Numerasi							
		• Skor Literasi SD	88,00	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50	
		• Skor Literasi SMP	87,00	87,10	87,20	87,30	87,40	87,50	
		• Skor Numerasi SD	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90	80,00	
		• Skor Numerasi SMP	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,70	
		Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	38,73	39,63	40,53	41,43	42,33	43,23	

Sedangkan Tingkat Capaian Kinerja dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	7%
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	7%



NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun}} \times 100\%$	%	7%
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	7%
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	7%
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	7%
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	7%
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.	%	7%
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten.	%	7%
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	7%
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%



NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	6%

Tabel 4.14
TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	52,09	60	65,5	70,35	75	80,35	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD	%	71,48	75	78	80,60	83,56	86,53	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (SD)	%	99,75	99,90	100	100	100	100	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	%	99,75	99,90	100	100	100	100	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan)	%	21,17	25,27	29,37	33,47	37,57	41,67	
6	Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	39,63	40,53	41,43	42,33	43,23	5	
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	-	80	85	90	95	100	
8	Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar	%	69	73	77	81	85	98	
9	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	55	60	65	70	75	100	
10	Persentase Satuan Pendidikan Swasta Berakreditasi B	%	75	80	85	90	95	100	

Sumber : RPJMD 2025-2029

Indikator kinerja sasaran di atas untuk evaluasi kinerja Dinas Pendidikan diwujudkan melalui 5 (lima) program.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bidang/ urusan Pendidikan 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode tahun 2025-2029. Mengacu kepada Visi Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai peran yang cukup strategis dalam mensukseskan Visi Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu : " Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Bekasi.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Bekasi.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pendidikan dan untuk target kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi dimasa yang akan datang.



Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini.

Bagimu Negeri, Jiwa raga Kami !

Bekasi, 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Ds. H. Alexander Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196603011990031010